



**PROSES PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
KEPADA MASYARAKAT PRASEJAHTERA DI DESA
GUNUNG HASAHATAN KECAMATAN
PADANGSIDIMPUAN
BATUNADUA**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Dalam Bidang Pengembangan Masyarakat Islam*

Oleh

MARA PANUSUNAN
NIM. 1730300011

PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2022



**PROSES PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
KEPADA MASYARAKAT PRASEJAHTERA DI DESA
GUNUNG HASAHATAN KECAMATAN
PADANGSIDIMPUAN
BATUNADUA**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Dalam Bidang Pengembangan Masyarakat Islam*

Oleh

MARA PANUSUNAN
NIM. 1730300011

PEMBIMBING I

Drs. Kamaluddin, M.Ag
NIP. 19651102 199103 1 001

PEMBIMBING II

Masrul Efendi Umar Harahap, M.Sos
NIP. 19910320 201903 1 008

**PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sitang Padangsidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

Hal : Skripsi
a.n. **Mara Panusunan**
Lampiran : 6 (enam) Exemplar

Padangsidempuan, 10 April 2022
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu
Komunikasi IAIN Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Mara Panusunan** yang berjudul: **PROSES PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) KEPADA MASYARAKAT PRASEJAHTERA DI DESA GUNUNG HASAHATAN KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA**, maka kami menyatakan bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam mendapat gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Ilmu Bimbingan Konseling Islam pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut telah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PEMBIMBING I

Drs. Kamaluddin, M.Ag
NIP. 196511021991031001

PEMBIMBING II

Masrul Efendi Umar Harahap, M.Sos
NIP. 197603022003122001

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MARA PANUSUNAN
Nim : 1730300011
Jurak/Prodi : Dakwah dan Ilmu Komunikasi/PMI
Judul Skripsi : PROSES PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) KEPADA MASYARAKAT PRASEJAHTERA DI DESA GUNUNG HASAHATAN KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA

Dengan ini menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa menerima bantuan tidak sah hak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa IAIN Padangsidimpuan pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum pada pasal 19 ayat ke 4 kode etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan mencabut gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 10 Maret 2022
Pembuat Pernyataan



MARA PANUSUNAN
NIM: 1730300011

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : MARA PANUSUNAN
Nim : 17 303 00011
Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“PROSES PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) KEPADA MASYARAKAT PRASEJAHTERA DI DESA GUNUNG HASAHATAN KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan Hak Bebas Royalti noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada Tanggal : 10 Maret 2022
Yang menyatakan,



MARA PANUSUNAN
NIM: 1730300011




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jln H T Rizal Nurdin Km 4,5 Sihatang, Padangsidempuan, 22733
Telp (0634) 22080 Fax (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA : MARA PANUSUNAN
NIM : 1730300011
JUDUL SKRIPSI : PROSES PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) KEPADA MASYARAKAT PRASEJAHTERA DI DESA GUNUNG HASAHATAN KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA

Ketua



Drs. Agus Salim Lubis, M.Ag
NIP.196308211993031003

Sekretaris




Barkah Hadamean, S.Sos.M.I.Kom
NIP.197908052006041004

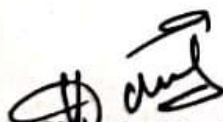
Anggota




Drs. H. Agus Salim Lubis, M.Ag
NIP. 196308211993031003



Barkah Hadamean, S.Sos.M.I.Kom
NIP. 197908052006041004



Drs. Khaliluddin, M.Ag
NIP.196511021991031001



Masrul Efendi Umar Harahap, M.Sos
NIP.199103202019031008

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan
Tanggal : 25 Maret 2022
Pukul : 08:30 Wib s/d. Selesai
Hasil/Nilai : 82.5
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3.87
Predikat : (Pujian)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jl. H. Tengku Rizal Nurdin Km 4,5 Sihatang Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

Nomor: *907* /In.14/F.4c/PP.00.9/4/2022

NAMA : Mara Panusunan
NIM : 17 303 00011
Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam
Judul Skripsi : Proses Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kepada Masyarakat Prasejahtera Di Desa Gunung Hasahatan Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua.

Telah dapat Diterima untuk Memenuhi Salah Satu Tugas

dan Syarat-Syarat dalam Memperoleh Gelar

Sarjana Sosial (S.Sos)

dalam Ilmu Bidang Komunikasi Penyiaran Islam

Padangsidimpuan, April 2022
Dekan


Dr. Magdalena, M. Ag
NIP.1974031920000320



ABSTRAK

Nama : Mara Panusunan

NIM : 1730300011

Judul : PROSES PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) KEPADA MASYARAKAT PRASEJAHTERA DI DESA GUNUNG HASAHATAN KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA

Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada Rumah Tangga Miskin bertujuan untuk membantu ekonomi masyarakat miskin yang disebabkan oleh kenaikan BBM pada bulan Oktober 2005, untuk Desa Gunung Hasahatan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) disalurkan kepada masyarakat yang dikategorikan miskin, yang terdaftar melalui pendataan BPS bersama Pemerintah setempat. Menurut ketentuannya adalah 300.000,- per KK (Kepala Keluarga) setiap bulannya dan diterima tiap tiga bulan sekali.

Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Gunung Hasahatan Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua dan bagaimana manfaat yang dirasakan masyarakat setelah menerima BLT?

Sementara itu dalam mendapatkan data dilapangan peneliti lakukan dengan menggunakan tehnik observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang kemudian penulis analisa dengan menggunakan tehnik analisa kualitatif dengan metode deskriptif.

Hasil penelitian proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Gunung Hasahatan Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua dilakukan dengan 3 (tiga) tahapan yaitu meliputi manajemen, administrasi, dan pendistribusian. Proses penyaluran ini juga tidak sesuai dengan ketentuannya, karena masih banyak pro dan kontra yang terjadi di kalangan masyarakat , karena masih ada sebagian warga yang tidak menerima BLT. Pengaruh dari bantuan ini sangat besar sekali manfaatnya bagi masyarakat dan dapat mempertahankan perekonomian masyarakat. Peran BLT untuk mengurangi kemiskinan relatif kecil karena jumlah yang diberikan terbilang sedikit dan bersifat sementara

Kata Kunci: Proses, Kemiskinan, Bantuan Langsung Tunai (BLT).

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan kepada peneliti untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi ini. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw yang telah menuntun umatnya kejalan yang benar.

Skripsi yang berjudul ” **PROSES PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) KEPADA MASYARAKAT PRASEJAHTERA DI DESA GUNUNG HASAHATAN KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA**” ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S. Sos) pada Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.

Peneliti sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan. Bapak Dr. Erawadi, M. Ag selaku Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A Wakil

Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Kerjasama dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag selaku Wakil Rektor Kemahasiswaan dan Kerjasama dan seluruh civitas akademik IAIN Padangsidimpuan.

2. Bapak Dr. Ali Sati, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan. Bapak Dr. Mohd. Rafiq. M.A selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Bapak Drs. Agus Salim Lubis, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Sholeh Fikri, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Risdawati S.Ag M.Pd. selaku ketua Program Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan. Bapak Mhd. Latif Kahfi, M.Kom. I selaku Sekretaris Prodi Komunikasi Peenyiaran Islam.
4. Bapak Dr. H. Armyn Hasibuan, M. Ag Selaku dosen Pembimbing I dan Ibu Siti Wahyuni Siregar S.Sos, I. M.Pd.I. Selaku dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Sukerman, S.Ag selaku Kasubbag Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi beserta stafnya yang telah memberikan pelayanan akademik yang baik demi kesuksesan dalam perkuliahan dan penyusun skripsi.
6. Bapak Yusri Fahmi, S.A.g, M.Hum., selaku kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan IAIN Padangsidimpuan yang telah membantu

penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

7. Para Dosen di lingkungan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan yang membekali berbagai pengetahuan sehingga mampu menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
8. Ungkapan terimakasih yang paling Istimewa kepada Ayahanda (Labuhan Hasibuan) dan Ibunda (Pestaria Harahap) tercinta yang telah mengasuh, mendidik, dan membimbing serta berkontribusi kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan sampai ke Perguruan Tinggi.
9. Ungkapan terimakasih teruntuk abang Mahmudin Irmansyah Hasibuan, adek Melani Putri Dewita Hasibuan dan Rifal Afrinaldi Hasibuan yang telah mendukung, menyemangati, membimbing serta berkontribusi kepada peneliti untuk menyelesaikan pendidikan sampai ke Perguruan Tinggi.
10. Kepada teman tercinta Febriani Nasution S, Sos, Yuly Syahfitri S.Sos, Nur Atikah Nasution S.Sos, Nur Hidayah S.Sos dan Mahasiswa/I KPI Nim 17 semoga Allah memberikan balasan yang baik kepada mereka yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Kepada Rekan-rekan Kos Pak Tapa Simamora; Masitoh Siregar S.Sos, Siska Romaito S.E, Sri Junita S.Sos dan Habsa Harahap S. Pd yang telah memberikan dukungannya kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang jauh lebih baik atas amal kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti. Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT, karena atas

karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Harapan peneliti semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan peneliti. Amin *Yarabbalamin*.

Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri peneliti. Peneliti juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Padangsidempuan, Maret 2022
Penulis

Mara Panusunan
NIM. 17 303 00011

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Batasan Istilah	8
D. Rumusan Masalah.....	10
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Kegunaan Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Teoritis.....	13
1. Latar Belakang Bantuan Langsung Tunai (BLT).....	13
2. Bentuk Bantuan.....	15
3. Dasar Hukum Bantuan Langsung Tunai (BLT).....	16
4. Syarat-Syarat Mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT).....	17
5. Mekanisme Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT)...	21

B. Konsep Keluarga Sejahtera	21
1. Pengertian Keluarga Sejahtera	21
2. Tingkat Ekonomi Masyarakat	24
3. Program Pengentasan Kemiskinan.....	26
C. Ilmu Dakwah Dalam Masyarakat	28
1. Ruang Lingkup Ilmu Dakwah	28
2. Karakteristik Manusia	29
D. Sustainable Development Goals (SDGs)	31
E. Teori Kritis	35
F. Kajian Terdahulu.....	36

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	38
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian	38
C. Informan Penelitian	39
D. Sumber Data	40
E. Teknik Pengumpulan Data	41
F. Teknik Analisa Data	43
G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data	43

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian.....	46
1. Profil Desa Gunung Hasahatan Kecamatan Padangsidempuan Batunadua	46
2. Visi Dan Misi Desa Gunung Hasahatan.....	46
3. Struktur Organisasi Desa Gunung Hasahatan	47
4. Penduduk Desa Gunung Hasahatan	51
5. Mata Pencaharian Masyarakat Penerima BLT.....	51

B. Temuan Khusus Penelitian.....	52
1. Proses Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Desa Gunung Hasahatan Kecamatan Padangsidempuan Batunadua.....	52
2. Manfaat Yang Dirasakan Oleh Masyarakat Setelah Menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT).....	63
C. Pembahasan.....	66

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel I	Data Penduduk di Desa Gunung Hasahatan Kecamatan Padangsidimpun Batunadu	51
Tabel II	Mata Pencarian Penduduk Penerima BLT Desa Gunung Hasahatan Kecamatan Padangsidimpun Batunadua	51
Tabel III	Tingkat Pendidikan Penerima BLT Di Desa Gunung Hasahatan 2021	60
Tabel IV	Jumlah Pendapatan Penerima Bantuan Langsung Tunai di Desa Gunung Hasahatan	61
Tabel V	Jumlah Anggota Keluarga Yang Ditanggung Masyarakat Penerima BLT Desa Gunung Hasahatan	62
Tabel VI	Manfaat/Kegunaan Uang BLT Oleh Masyarakat Desa Gunung Hasahatan	62
TABEL VII	Jumlah Anggota Keluarga Yang Ditanggung Masyarakat Yang Tidak Menerima BLT di Desa Gunung Hasahatan..	63
TABEL VIII	Manfaat/Kegunaan Uang BLT Oleh Masyarakat Desa Gunung Hasahatan.....	63

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Gunung Hasahahatan Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Tahun 2021	48
proses-proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT)	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks, tidak hanya berkaitan dengan rendahnya tingkat pendapatan dan konsumsi, melainkan juga berkaitan dengan rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan, ketidakberdayaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan serta berbagai masalah yang berkenaan dengan manusia seperti kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat dan tingkat pendidikan yang rendah.

Menurut Jamaludin, kemiskinan merupakan masalah global. Kemiskinan adalah kemelaratan dan ketidak mampuan masyarakat yang diukur dalam suatu standar hidup tertentu, konsep miskin relatif berdasarkan analisis perbandingan di negara-negara kaya maupun miskin. Konsep kemiskinan secara mendasar adanya wabah kelaparan, ketidak berdayaan dalam membesarkan atau mendidik anak dan lain-lain.¹

Menurut para ahli kemiskinan adalah situasi serba terbatas yang terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan. Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa kemiskinan disebabkan tidak adanya pemerataan, serakahnya segolongan orang yaitu pejabat dan pengusaha. Hal ini menimbulkan keresahan dan keguncangan di tengah masyarakat, akibatnya terputus tali kasih sayang yang berujung kemiskinan.²

¹Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Perkotaan Memahami Masyarakat Kota dan Problematikanya*, (Bandung : Pustaka Setia, 2017), hlm. 224.

²Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Terj. Halim, (Jakarta : Gema Insani Press, 2015), hlm. 29.

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang memiliki tujuan dan alasan tertentu, Program tersebut muncul sebagai manifestasi adanya tindakan dari pemerintah yang berisikan nilai-nilai tertentu, yang ditujukan untuk memecahkan persoalan publik yang dimaksud adalah persoalan kemiskinan.

Secara umum kemiskinan adalah bilamana masyarakat berada pada suatu kondisi yang serba terbatas, baik dalam aksesibilitas pada factor produksi, peluang/kesempatan berusaha, pendidikan, fasilitas hidup lainnya.³ Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dilatar belakangi upaya mempertahankan tingkat konsumsi Rumah Tangga Sasaran (RTS) sebagai akibat adanya pandemi yang berdampak akan perekonomian masyarakat terutama masyarakat miskin yang terkena dampak Tujuan BLT adalah :

1. Membantu masyarakat miskin agar tetap memenuhi kebutuhan dasarnya.
2. Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi.
3. Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama.

Tentunya peran Pemerintah sangat diperlukan dalam suatu perekonomian. Peran yang diharapkan adalah sebuah peran positif yang berupa kewajiban moral untuk membantu mewujudkan kesejahteraan semua orang dengan menjamin keseimbangan antara kepentingan privat dan sosial memelihara roda perekonomian pada jalur yang benar.

³BKKBN, *Pelaksanaan Operasional Indikator Pembangunan Keluarga Sejahtera*, (Jakarta: BKKBN, 1994), hlm. 26.

Memperkuat salah satu dari tripologi pembangunan, yaitu stabilitas ekonomi. Sehingga, pembangunan dapat dilanjutkan terus-menerus. Pembangunan yang berkelanjutan terus amat diperlukan guna mempercepat pencapaian masyarakat adil dan makmur.

Tujuan pembangunan pada hakekatnya dapat dibagi menjadi tiga (tiga) yaitu:

1. Untuk meningkatkan produksi.
2. Untuk membuka kesempatan kerja.
3. Untuk menaikkan dan meratakan pembangunan.

Tingkat kesejahteraan dapat dibedakan oleh beberapa faktor baik yang ada di dalam maupun di luar hubungan keluarga. Faktor internal yang menentukan kesejahteraan antara lain kesehatan penduduk, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterampilan, ekonomi dan lain-lain. Faktor eksternal meliputi struktur sosial ekonomi, fasilitas, produksi dan konsumsi, transportasi dan komunikasi yang mendukung bagi upaya pemenuhan kebutuhan keluarga.⁴

Dalam suatu perekonomian pendapatan merupakan faktor yang terpenting dalam mengetahui tingkat kesejahteraan, karena dengan adanya pendapatan maka kegiatan perekonomian dapat berjalan. Dalam artian ekonomi pendapatan merupakan balas jasa atas penggunaan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh sektor rumah tangga, oleh sektor perusahaan yang dapat berupa gaji dan upah, sewa, bunga serta keuntungan/ profit.⁵

⁴BKKBN, *Pelaksanaan Operasional Indikator Pembangunan Keluarga Sejahtera*, (Jakarta: BKKBN, 1994), hlm. 26.

⁵Sukirno Sadono, *Pengantar Teori Makro Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 91.

Pengertian kemiskinan seringkali menjadi topik perdebatan di antara berbagai pihak baik ditingkat nasional, regional, maupun lokal. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, para donor dan para peneliti lokal seringkali mempunyai perspektif yang berbeda tentang kriteria kemiskinan. Kendati demikian, pada umumnya semua sepakat terhadap keterbatasan dan pengukuran yang ada sekarang ini, yakni perhitungan jumlah penduduk miskin yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistika (BPS) dan sistem pendataan yang dilakukan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, yang dasar keduanya dirancang, dianalisa dan digunakan secara sentralistik.

Masyarakat dikatakan miskin menurut Todaro adalah bagi mereka yang bertempat tinggal di daerah pedesaan dan memiliki kegiatan utama dibidang pertanian dan kegiatan yang berhubungan dengan itu. Sedangkan menurut Emil Salim mereka yang berada dibawah garis kemiskinan apabila pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan yang paling pokok seperti pangan, pakaian, tempat berteduh dan lain-lain.⁶

Di dalam Qamus Al-Muhit kata miskin diartikan dengan orang yang tidak memiliki sesuatu, atau memiliki sesuatu tetapi tidak mencukupinya, atau orang yang dibuat diam oleh kefaqiran dan dapat juga diartikan dengan orang yang hina dan lemah (*Majd*). Sedangkan kata miskin di dalam kamus Lisan *al-'Arab* diartikan sebagai orang yang tidak memiliki apa-apa, dan ada juga yang

⁶Hadi Prayitno dan Budi Santoso, *Ekonomi Pembangunan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996), hlm. 102.

mengatakan, miskin adalah orang yang tidak memiliki sesuatu yang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya.⁷

Firman Allah SWT dalam Surah Ar- Rum: 38

فَاتِذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: Maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridaan Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.⁸

Firman Allah SWT dalam Surah Al-Isra: 26

وَاتِذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

Artinya: Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.⁹

Desa Gunung Hasahatan merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, mata pencaharian sebagian besar warga di Desa Gunung Hasahatan adalah sebagai petani. Desa Gunung Hasahatan merupakan salah satu desa yang menerima yang namanya Bantuan Langsung Tunai (BLT), telah terdata dan terdaftar jumlah masyarakat yang mendapatkan Bantuan Langsung Tunai sebanyak 40 Kepala Keluarga dan 5 Kepala Keluarga yang tidak menerima Bantuan Langsung Tunai padahal memenuhi kriteria syarat penerima bantuan. Periode Bantuan Langsung Tunai ini berbeda yaitu ada yang

⁷Lukman Hakim, Ahmad Danu Syaputra, "Al-Qur'an dan Pengentasan Kemiskinan," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534, hlm. 2.

⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), hlm. 575.

⁹*Ibid.*, hlm. 388.

Rp 600.000/ Kepala Keluarga selama 3 bulan dan ada yang Rp 300.000/ Kepala Keluarga selama 12 bulan.¹⁰

Dalam pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang Rp 300.000/ Kepala Keluarga pencairannya dilakukan/rapel menjadi tiga bulan sekali yang semula dicairkan sebulan sekali, perubahan ini dilakukan untuk mempercepat mekanisme penyaluran sehingga Bantuan Langsung Tunai (BLT) lebih cepat diterima oleh warga yang membutuhkan. Pemerintah mengubah mekanismenya sesuai aturan terbaru, yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 yang berbunyi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu yang bersumber dari dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi.¹¹

Dalam pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini Kepala Desa Gunung Hasahatan dibantu oleh Perangkat Desa, dalam pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) warga harus mengikuti peraturan dan tata tertib yang sudah disampaikan oleh petugas pembagi Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Dana kompensasi yang berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada rumah tangga miskin adalah sejumlah uang yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang tergolong miskin sebagai kompensasi pengurangan subsidi BBM, yang dituangkan dalam Inpres No. 12 tahun 2005 tentang pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada rumah tangga miskin.¹²

¹⁰Wawancara dengan Kepala Desa Gunung Hasahatan 13 Mei 2021.

¹¹Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 94/PMK. 07/2021.

¹²Inpres No. 12 tahun 2005 *Tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kepada Rumah Tangga Miskin.*

Secara umum, program Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi penduduk miskin mempunyai tujuan yang sangat baik, namun pelaksanaan dana Bantuan Langsung Tunai banyak mengalami permasalahan diantaranya menyangkut sasaran, pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini juga dinikmati oleh masyarakat kaya sehingga, yang miskin semakin miskin yang kaya semakin kaya padahal bantuan ini ditujukan untuk masyarakat miskin sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Kalau kita cermati program ini tampaknya dirasakan ada manfaatnya. Namun masyarakat di desa Gunung Hasahatan kurang memahami arti dari bantuan ini. Hal ini tampak dari pemanfaatan dana yang pada umumnya digunakan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, padahal kalau masyarakat memahami alangkah baiknya digunakan untuk usaha tertentu sehingga menghasilkan pendapatan, dan bantuan ini membuat sebagian masyarakat malas untuk bekerja karena mengandalkan dana tersebut padahal program ini bertujuan untuk membantu dan menambah pendapatan dari masyarakat miskin. Bantuan ini juga bersifat sementara sehingga tidak bisa selamanya membantu perekonomian masyarakat, hanya bisa membantu kebutuhan hidup masyarakat sesaat. Untuk itu diharapkan adanya jenis bantuan yang dapat meningkatkan keahlian dan keterampilan masyarakat sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Ditinjau dari segi kelayakan penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, karena masih banyak masyarakat yang rata-rata ekonominya menengah keatas menerima dan menikmati Bantuan

Langsung Tunai (BLT) tersebut. Dilihat dari kondisi ekonomi masih banyak keluarga atau rumah tangga yang pantas dan layak untuk menerima Bantuan Langsung Tunai ini (BLT) ini, mereka tidak menerima hak mereka sebagaimana yang tertera didalam peraturan penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT). Hal ini dikarenakan kecerobohan pihak pemerintahan desa yang kurang teliti dalam mendata masyarakat yang kurang mampu atau yang ekonominya menengah ke bawah.¹³ Hal ini yang membuat peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “**Proses Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kepada Masyarakat Prasejahtera Di Desa Gunung Hasahatan Kecamatan Padangsidempuan Batunadua**”.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan, maka Penulis membatasi permasalahan penelitian ini pada Proses Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kepada Masyarakat Prasejahtera di Desa Gunung Hasahatan Kecamatan Padangsidempuan Batunadua.

C. Batasan Istilah

Menghindari kesalah pahaman dalam mengartikan kata dan kalimat dalam penelitian ini, maka berikut diuraikan batasan-batasan kata atau istilah, sebagai berikut:

1. Proses adalah sebuah homonym karena artinya memiliki pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Proses memiliki arti dalam nomina atau kata benda sehingga proses dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua

¹³Observasi Awal di Desa Gunung Hasahatan 9 Mei 2021.

benda dan segala yang dibendakan. Proses juga memiliki arti perubahan peristiwa dalam perkembangan sesuatu, rangkaian tindakan yang menghasilkan produk dan perkara dalam pengadilan.¹⁴

2. Penyaluran atau pendistribusian berasal dari bahasa Inggris yaitu *distribute* yang berarti pembagian, secara terminologi penyaluran adalah (pembagian, pengiriman) kepada orang banyak atau beberapa tempat. Pengertian lain mendefinisikan distribusi sebagai penyaluran barang keperluan sehari-hari (terutama dalam masa darurat) oleh pemerintah kepada pegawai, penduduk dan sebagainya.¹⁵
3. Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat maupun tidak bersyarat untuk masyarakat miskin.¹⁶
4. Masyarakat Prasejahtera adalah merupakan kemampuan keluarga untuk pemenuhan kebutuhan dasar, kebutuhan psikososial, kemampuan memenuhi ekonominya, dan aktualisasi keluarga di masyarakat, serta memperhatikan perkembangan Negara Indonesia menuju Negara industri.¹⁷ Masyarakat Prasejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar secara minimal, yaitu kebutuhan pengajaran agama, pangan, sandang, papan

¹⁴W. H. S Poerwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hlm. 233.

¹⁵*Ibid.*, hlm 250.

¹⁶Teguh Putra, Arka'a Ahmad Agin Medinal, "Analisis Pengaruh Pendidikan, Pengangguran, dan Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kemiskinan di Kelurahan Tuatunu Indah Kota Pangkal Pinang," *Jurnal Progresif Manajemen Bisnis (JIPMB)*, *STIE-IBEK, Volume 6 Nomor 5 November 2019. ISSN 2354-5682*, hlm. 339.

¹⁷Suprajitno, *Asuhan Keperawatan Keluarga* (Jakarta: EGC,2004), hlm. 7.

dan kesehatan atau keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih dari indikator-indikator tersebut.¹⁸

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat prasejahtera di Desa Gunung Hasahatan Kecamatan Padangsidempuan Batunadua?
2. Bagaimana manfaat yang dirasakan oleh masyarakat setelah menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Gunung Hasahatan kecamatan Padangsidempuan Batunadua?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini antara lain untuk :

1. Untuk menganalisis bagaimana proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat prasejahtera di Desa Gunung Hasahatan Kecamatan Padangsidempuan Batunadua.
2. Untuk mengetahui bagaimana manfaat yang dirasakan oleh masyarakat setelah menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) tersebut.

F. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terbagi dua, yaitu :

1. Secara Teoritis
 - a. Berkaitan dengan pengembangan ilmu bahwa secara teori menambah pengetahuan dan wawasan utamanya dalam mengikuti perkembangan

¹⁸Kemestrian Sosial RI, *Pedoman Umum Bantuan Sosial Beras Sejahtera Tahun 2018*, Jakarta: 2017, hlm. 26.

masyarakat lewat Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dirasakan dan dialami oleh masyarakat, sehingga dengan penelitian ini wawasan keilmuan menjadi bertambah.

- b. Penelitian ini sebagai pengembangan ilmu bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan bagi pendamping serta Dinas Sosial yang terkait
- c. Menambah khazanah keilmuan bagi pengembangan wacana di bidang sosial kemasyarakatan tersebut.

2. Secara Praktis

- a. Dapat menjadi bahan evaluasi terhadap program pemerintah dalam mengembangkan kebijakan program lanjutan dalam membantu mengurangi beban kemiskinan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan.
- b. Sebagai sumber informasi, bahwa Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan salah satu program pemerintah yang langsung dapat dinikmati oleh masyarakat penerima manfaat dalam membantu kesejahteraan yang di dalamnya pendidikan dan kesehatan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan penelitian proposal ini maka perlu dibuat sistematika pembahasan dengan beberapa BAB sebagai berikut:

BAB I membahas tentang Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Fokus Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II membahas tentang Kajian Pustaka yang terdiri dari latar belakang Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bentuk Bantuan, Dasar hukum Penetapan BLT, Mekanisme Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT).

BAB III membahas tentang Metodologi Penelitian yang terdiri dari Lokasi dan Waktu Penelitian, Jenis dan Pendekatan Penelitian, Informan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisa Data Teknik Penjaminan Keabsahan Data.

BAB IV membahas tentang hasil penelitian tentang Proses Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kepada Masyarakat Prasejahtera di Desa Gunung Hasahatan Kecamatan Padangsidempuan Batunadua.

BAB V merupakan bagian dari Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran-Saran yang didasarkan kepada penemuan Peneliti dan dilengkapi dengan daftar literatur dan lampiran-lampiran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teoritis

1. Latar Belakang Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Pada Bulan Oktober 2005, Pemerintah menaikkan harga dasar BBM. Kenaikan tersebut mengakibatkan harga kebutuhan pokok meningkat dan bagi masyarakat miskin mengakibatkan daya beli mereka semakin menurun karena akan mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan perkembangan harga pasar. Untuk itu diperlukan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. Seiring dengan besarnya beban subsidi yang dianggap membebani keuangan negara, pemerintah perlu meninjau kembali kebijakan subsidi BBM sehingga subsidi tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat miskin. Salah satu bentuk kebijakan penghapusan subsidi BBM adalah Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPS-BBM) berupa Subsidi/Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada Rumah Tangga Miskin (RTM).¹⁹

Dalam mendukung kelancaran program tersebut diperlukan ketersediaan data kemiskinan baik jumlah maupun karakteristiknya yang bersifat makro agar sasaran program lebih terarah serta data kemiskinan yang bersifat mikro yang menunjukkan informasi tentang siapa dan dimana penduduk miskin berada. Data tersebut berguna bagi distribusi bantuan

¹⁹Hadi Prayitno, *Ekonomi Pembangunan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996), cet-1, hlm. 99.

langsung kepada penduduk miskin agar dapat dilakukan secara efektif dan lebih tepat sasaran.

Penyediaan data kemiskinan mikro walaupun telah dilakukan di beberapa provinsi, tetapi cakupan, waktu pelaksanaan dan kriteria yang digunakan antar daerah hasilnya masih bervariasi. Atas dasar hal tersebut, pemerintah merasa perlu untuk melakukan Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk 2005 di seluruh wilayah Indonesia melalui pendekatan yang terintegrasi dengan tujuan memperoleh informasi tentang siapa dan dimana penduduk/keluarga miskin.

Ketimpangan pendistribusian pendapatan lebih terasa lagi ketika negara sedang dilanda berbagai krisis, terutama sekali krisis moneter atau ekonomi. Krisis ekonomi yang berkepanjangan ini telah pula menurunkan kesejahteraan rakyat Indonesia secara drastis. Terutama sekali rakyat yang berada dibawah garis kemiskinan.

Masalah kemiskinan muncul karena adanya sekelompok anggota masyarakat yang secara struktural tidak mempunyai peluang untuk mencapai tingkat kehidupan yang layak. Akibatnya ia harus mengakui keunggulan kelompok masyarakat lainnya dalam persaingan mencari nafkah dan kepemilikan aset yang produktif sehingga semakin lama semakin tertinggal. Dalam prosesnya gejala tersebut memunculkan masalah baru yakni terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan.²⁰

²⁰Hadi Prayitno, *Ekonomi Pembangunan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996), cet-1, hlm. 99.

Misi perbaikan tingkat kesejahteraan rakyat kecil dan untuk lebih menjamin keberadaan hak-hak mereka terus diagung-agungkan. Berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan dan kebutuhan masyarakat miskin harus selalu diprioritaskan. Oleh karena itulah dalam upaya mengurangi beban mereka yang termasuk kedalam kategori masyarakat miskin, maka diselenggarakan program bantuan pemerintah untuk rakyat yang terkena imbas akibat perubahan sosial politik Negara.

Program bantuan pemerintah itu meliputi, program raskin, program Kompensasi pengurangan subsidi BBM berupa Bantuan Langsung Tunai(BLT) tahun 2008. Program bantuan tersebut mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk kesejahteraan masyarakatnya.²¹

2. Bentuk Bantuan

Secara kongkrit upaya peningkatan kesejahteraan rakyat berlandaskan sistem ekonomi kerakyatan perlu dilakukan dalam program pembangunan lintas sektoral. Di antaranya adalah melalui berbagai upaya dalam rangka penanggulangan kemiskinan ketenaga kerjaan, pemberdayaan usaha mikro, menengah, koperasi, pembangunan pertanian, pangan dan pengairan, pembangunan sarana dan prasarana pedesaan serta berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam lingkungan hidup.

Program-program tersebut harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program pembangunan nasional. Hal ini sesuai dengan prinsip keadilan dimana penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu upayastrategis dalam mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan .

²¹*Ibid.*

Oleh karena itu mulai tahun 2005-2008 pemerintah mengadakan suatu program bantuan rakyat. Program itu antaranya, Dana Kompensasi BBM, Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang berupa bentuk uang yang disalurkan langsung kepada masyarakat miskin pada tahun 2008.

3. Dasar Hukum Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Adapun dasar Hukum penetapan Bantuan Langsung Tunai (BLT) berdasarkan:

- a. Keputusan Presiden RI No. 12 tahun 2005, tentang pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) di seluruh Indonesia.²²
- b. Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Untuk Rumah Tangga Sangat Miskin (*poorest*), Rumah Tangga Miskin (*poor*) dan Rumah Tangga Hampir Miskin (*near poor*) di seluruh wilayah Indonesia.²³

Dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2008, maka Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Kepada Rumah Tangga Miskin dinyatakan tidak berlaku lagi.

Untuk kelancaran pelaksanaan program pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada rumah tangga sasaran yang meliputi rumah tangga sangat miskin, rumah tangga miskin dan rumah tangga hampir miskin

²²Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2005 tanggal 10 September 2005. *Tentang Bantuan Langsung Tunai Kepada Rumah Tangga Miskin.*

²³Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2008 tanggal 14 Mei 2008. *Tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Untuk Rumah Tangga Sasaran.*

dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), dengan ini menginstruksikan Kepada:

- a. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.
- b. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
- c. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- d. Menteri Keuangan.
- e. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- f. Menteri Sosial.
- g. Menteri Dalam Negeri.
- h. Menteri Komunikasi dan Informatika.
- i. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.
- j. Jaksa Agung Republik Indonesia.
- k. Tentara Nasional Indonesia.
- l. Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- m. Kepala Badan Pusat Statistik.
- n. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- o. Para Gubernur.
- p. Para Bupati/Walikota.²⁴

4. Syarat-Syarat Mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Keluarga fakir miskin di Indonesia sangat banyak dari yang benar-benar miskin sampai kepada yang mengaku miskin yang ingin mendapatkan bantuan.

²⁴*Ibid.*

Karena banyaknya masyarakat yang miskin, maka perlu pengklasifikasiannya agar bantuan tersebut benar-benar diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Departemen Sosial (DepSos) mendefinisikan fakir miskin itu adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan/orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetap tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya.²⁵ Fakir miskin ini mempunyai ciri-ciri yaitu keterbatasan atau kurangnya kemampuan ekonomi, keterampilan, pendidikan, rendahnya tingkat kesehatan dan keadaan gizi keluarga, terbatasnya lapangan dan kesempatan kerja serta keterbatasan akses dalam kegiatan ekonomi.

Menurut Emil Salim, ciri masyarakat miskin adalah mereka tidak mempunyai faktor produksi, mereka tidak memiliki kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri, tingkat pendidikan rendah karena waktu mereka tersita untuk mencari nafkah dan mendapatkan pendapatan penghasilan, kebanyakan mereka tinggal dipedesaan dan mereka yang hidup dikota masih berusia muda dan tidak didukung oleh keterampilan yang memadai, pada umumnya pendapatan mereka tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan yang paling pokok seperti pangan, pakaian, tempat berteduh dan lain-lain.²⁶

²⁵Keputusan Menteri Sosial RI, No. 23/Huk/1996. *Tentang Pola Dasar Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: DEPSOS RI, 1996) hlm. 130.

²⁶Hadi Prayitno., *Op. Cit*, hlm. 102.

Pengertian miskin yang dikemukakan oleh Imam Malik, “ orang yang untuk keperluan hidupnya tidak segan-segan meminta bantuan orang lain”. Pengertian ini sama dengan pengertian miskin menurut Abu Hanifah, dimana miskin lebih banyak/sangat membutuhkan daripada fakir.²⁷

Berdasarkan gambaran di atas, maka pemerintah menetapkan kriteria penerima BLT untuk Rumah Tangga Sasaran (Rumah Tangga Sangat Miskin (*poorest*), Rumah Tangga Miskin (*poor*) dan Rumah Tangga Hampir Miskin (*near poor*) 14 kriteria, adalah sebagai berikut:

- a. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 meter persegi untuk masing-masing anggota keluarga.
- b. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah, bambu, kayu berkualitas rendah.
- c. Jenis dinding bangunan tempat tinggal terbuat dari bambu, rumbia, kayu berkualitas rendah.
- d. Fasilitas jamban tidak ada, atau ada tetapi dimiliki secara bersama-sama dengan keluarga lain.
- e. Sumber air untuk minum/memasak berasal dari sumur/mata air tidak terlindung, air sungai, danau, atau air hujan.
- f. Sumber penerangan di rumah bukan listrik.
- g. Bahan bakar yang digunakan memasak berasal dari kayu bakar, arang, atau minyak tanah.
- h. Dalam seminggu tidak pernah mengonsumsi daging, susu, atau hanyasekali

²⁷Djazuli, *Fiqih Siyarah Implementasi Kemaslahan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*, (Bandung: Kencana, 2003), hlm. 347-348.

dalam seminggu.

- i. Dalam setahun paling tidak hanya mampu membeli pakaian baru satu stel.
- j. Makan dalam sehari hanya satu kali atau dua kali.
- k. Pekerjaan utama kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan setengah hektar, buruh tani, kuli bangunan, tukang batu, tukang becak, pemulung, atau pekerja informal lainnya dengan pendapatan maksimal Rp. 600 ribu per bulan.
- l. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan kepala rumah tangga bersangkutan tidak lebih dari SD.
- m. Tidak memiliki harta senilai Rp 500 ribu seperti tabungan, perhiasan emas, TV berwarna, ternak, sepeda motor (kredit/non-kredit), kapal motor, tanah, atau barang modal lainnya.²⁸

Selain 14 poin di atas, anggota rumah tangga yang bekerja sebagai PNS, anggota TNI, POLRI, pegawai BUMN/BUMD, pensiunan PNS/TNI/POLRI, maka keluarga tersebut tidak berhak mendapat BLT. Namun kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat mengandung pro dan kontra terhadap realitanya di lapangan, kriteria yang telah ditetapkan pemerintah tidak cocok, seperti pendataan penduduk miskin yang menerima BLT, penentuan kriteria miskin, sehingga pemerintahan Desa Sungai Sarik mengeluarkan kebijakan-kebijakan tentang BLT yang telah diberikan wewenang oleh pemerintahan Kabupaten.

²⁸Djazuli, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*, (Bandung: Kencana, 2003), hlm. 347-348.

5. Mekanisme Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Adapun organisasi dalam tahap penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) meliputi:

a. Pendistribusian KKB

- 1) PT. Pos Indonesia bertugas membuat/mencetak KKB sesuai data yang diberikan oleh BPS dan mengirimkan KKB yang telah dicetak langsung ke alamat BPS Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.
- 2) PT. Pos Indonesia bertugas membuat/mencetak KKB sesuai data yang diberikan oleh BPS dan mengirimkan KKB yang telah dicetak langsung ke alamat BPS Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

b. Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT)

PT Pos Indonesia melalui Kantor Pos Bayar bertugas untuk:

- 1) Melakukan penyaluran dana BLT-RTS sesuai dengan daftar penerima BLT dan KKB.
- 2) Melakukan supervisi, monitoring dan pengawasan khusus yang berkaitan dengan penyaluran BLT-RTS.²⁹

B. Konsep Keluarga Sejahtera

1. Pengertian Keluarga Sejahtera

Keluarga merupakan kelompok primer yang terpenting dalam masyarakat. Dalam arti luas, keluarga yang berkaitan dengan hubungan yang meliputi semua pihak yang ada hubungan darah sehingga sering tampil sebagai

²⁹Hertina dan Jumni Neli, *Sosiologi Keluarga*, (Riau: Alaf Riau, 2007), hlm. 5-9.

arti clan atau marga. Dalam kaitan inilah dalam berbagai budaya setiap orang memiliki nama kecil dan nama keluarga (marga). Sedang dalam arti sempit keluarga merupakan kelompok sosial terkecil yang didasarkan hubungan darah yang terdiri atas ayah-ibu-dan anak, yang dijuluki keluarga inti.³⁰

Keluarga pada dasarnya merupakan suatu kelompok yang terbentuk dari suatu hubungan seks yang tetap, untuk menyelenggarakan hal-hal yang berkenaan dengan keorngtuan dan pemeliharaan anak.

Ciri- ciri umum keluarga meliputi:

- a. Adanya hubungan berpasangan antara kedua jenis
- b. Dikukuhkan oleh suatu perkawinan
- c. Adanya pengakuan terhadap garis keturunan (anak) yang dilahirkan dalam rangka hubungan tersebut
- d. Ketentuan-ketentuan ekonomi yang dibentuk oleh anggota-anggota yang mempunyai ketentuan khusus terhadap kebutuhan-kebutuhan ekonomi yang berkaitan dengan kemampuan untuk mempunyai keturunan dan membesarkan anak
- e. Diselenggarakan kehidupan rumah tangga dalam suatu rumah

Dalam sebuah keluarga masing-masing anggota keluarga mempunyai tugas. Setiap pekerjaan yang harus dilakukan dalam kehidupan keluarga disebut fungsi. Diantara fungsi-fungsi keluarga adalah sebagai berikut :

- a. Fungsi Edukatif, hal ini berkaitan dengan pendidikan dan pembinaan anggota keluarga pada umumnya. Keluarga merupakan guru pertama dalam mendidik manusia. Fungsi edukatif ini dapat terlihat dari pertumbuhan

³⁰Hertina dan Jumni Neli, *Sosiologi Keluarga*, (Riau: Alaf Riau, 2007), hlm. 5-9.

seorang anak mulai dari bayi sampai anak itu dewasa. Contoh pendidikan ini dapat dilihat dari cara anak menerima sesuatu dengan tangan kanan, dan lain sebagainya semua gerak gerik yang dilakukan anak-anak dalam kehidupan sehari-hari sehingga tumbuh menjadi kebiasaan dan kepribadian anak yang diadopsinya dari keluarga.

- b. Fungsi Sosialisasi, berkaitan dengan membantu dan mempersiapkan anggota keluarga menjadi anggota masyarakat. Keluarga memberikan bekal bagaimana tingkah laku, sikap, keyakinan, cita-cita dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat serta mempelajari peranan yang diharapkan akan dijalankan mereka.
- c. Fungsi protektif atau Lindungan, keluarga merupakan tempat melindungi anggota keluarga khususnya anak dari tindakan-tindakan yang tidak baik dan penyimpangan norma.
- d. Fungsi Afeksi atau Perasaan, salah satu kebutuhan dasar manusia ialah kebutuhan kasih sayang atau rasa dicinta.
- e. Fungsi Religius
- f. Fungsi Ekonomi
- g. Fungsi Rekreasi
- h. Fungsi Biologis.³¹

Dalam mewujudkan keluarga sakinah diperlukan cinta kasih, cinta kasih mempunyai makna yang berbeda-beda namun, cinta merupakan anugrah yang mana dapat diibaratkan sebuah kendaraan yang membawa keduanya pada suatu tempat. Pemberhentian kendaraan cinta bagi setiap orang dapat berwujud macam-macam.

³¹Hertina, Jumni Neli., *Op. Cit*, hlm. 69.

Salah satu pemberhentian cinta adalah perkawinan.³²

2. Tingkat Ekonomi Masyarakat

Menurut Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi struktur sosial adalah keseluruhan jalinan antara unsur – unsur sosial pokok, yaitu kaidah- kaidah sosial (norma sosial), lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok sosial, serta lapisan-lapisan sosial. Di antara struktur sosial yang ada, yang menonjol adalah lapisan-lapisan sosial atau stratifikasi sosial. Untuk hal yang terakhir ini akan dibahas dalam bagian berikutnya.

Stratifikasi sosial dapat didefinisikan sebagai perbedaan anggota masyarakat berdasarkan status yang dimilikinya. Status yang dimiliki seseorang dibedakan lagi antara status yang diperoleh (*ascribed status*) dan status yang diraih (*achieved status*). Status yang diperoleh misalnya perbedaan usia, perbedaan jenis kelamin, hubungan kekerabatan dan keanggotaan dalam kelompok seperti kasta dan kelas sosial. Sedangkan status yang diraih adalah status sosial yang diperoleh seseorang karena prestasi kerja yang diperolehnya.

Bentuk-bentuk stratifikasi sosial sebagai berikut :

- a. Stratifikasi sosial berdasarkan sosial, sangat menentukan hak dan wewenang dari mereka yang menjadi anak suung dan bukan. Dalam sistem kerajaan Inggris misalnya, anak sulung memiliki hak untuk menjadi putra mahkota menggantikan kedudukan raja dikemudian hari.
- b. Stratifikasi jenis kelamin. Stratifikasi ini menentukan hak dan
- c. Stratifikasi berdasarkan etnis, agama dan golongan dalam masyarakat.
- d. Stratifikasi ini berdasarkan pendidikan. Stratifikasi berdasarkan tingkat

³²Hasbi Indra dan Iskandar Ahza, *Potret Wanita Shalehah*, (Jakarta: Penamadani, 2004), hlm. 68.

pendidikan yang dimiliki seseorang.

- e. Semakin tinggi pendidikan yang dimilikinya, semakin tinggi kedudukan sosial seseorang. Stratifikasi berdasarkan pekerjaan. Stratifikasi ini tergantung jabatan seseorang dalam pekerjaan. Ada yang berkedudukan sebagai menejer dan ada yang berkedudukan sebagai pekerja biasa saja.
- f. Stratifikasi berdasarkan tingkat perekonomian yang dimiliki seseorang. Ada yang berkedudukan sebagai kelas atas, menengah dan ada yang kelas bawah.³³

Pada hakikatnya, sebuah rumah tangga muslim merupakan dasar bagi terbentuknya masyarakat, Yang dimaksud rumah tangga muslim adalah sekelompok individu yang terdiri atas orang tua dan anak-anak yang hidup bersama dalam suasana islami dan diikat oleh norma-norma keluarga muslim yang selalu mendasarkan berbagai perkara hidupnya pada syariat. Tujuan rumah tangga muslim adalah menciptakan kehidupan yang penuh rasa aman, tentram, kasih sayang, dan rahmat, dengan mengharap ridho Allah SWT dunia dan akhirat. Rumah tangga muslim mempunyai keistimewaan diantaranya:

- a. Memiliki nilai aqidah, yaitu keyakinan kepada Allah SWT
- b. Berakhlak Mulia
- c. Bersifat pertengahan dan seimbang
- d. Berdiri diatas usaha yang baik
- e. Memprioritaskan kebutuhan primer

³³Philip dan Nurul Aini, *Sosiologi dan Politik*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 35-37.

- f. Memiliki perbedaan antara keuangan Laki-laki dan Wanita.³⁴

3. Program Pengentasan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah pembangunan diberbagai bidang yang ditandai dengan tingkat pengangguran yang tinggi, keterbelakangan, dan keterpurukan, yang disebabkan oleh perubahan sosial diantaranya terkena musibah bencana alam, pemutusan hubungan kerja, serta menderita akibat perubahan sosial ekonomi, jumlah penduduk yang semakin banyak tetapi pendapatannya tidak mencukupi kebutuhan primer (pokok). Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan telah menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Kemiskinan bukan hanya masalah Indonesia, tetapi merupakan masalah dunia sehingga lembaga-lembaga dunia seperti Bank Dunia pada tahun 1990, lewat laporannya *World Development Report on Poverty* mendeklarasikan bahwa suatu peperangan yang berhasil melawan kemiskinan perlu dilakukan secara serentak pada tiga tempat:

- a. Pertumbuhan ekonomi yang luas dan padat karya yang menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan bagi kelompok miskin.
- b. Pengembangan SDM (pendidikan, kesehatan, dan gizi) yang memberi mereka kemampuan yang lebih baik untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang diciptakan oleh pertumbuhan ekonomi.
- c. Membuat sarana jaringan pengaman sosial untuk mereka di antara penduduk miskin yang sama sekali tidak mampu untuk mendapatkan keuntungan dari

³⁴Husean Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 49-55.

pertumbuhan ekonomi dan kesempatan pengembangan SDM akibat ketidakmampuan fisik dan mental, bencana alam, dan konflik sosial.³⁵

Salah satu program pemerintah Indonesia untuk masyarakat miskin yaitu jaring pengaman sosial (JPS) atau sistem dana jamina sosial atau dana kompensasi BBM. Program JPS dimulai pada bulan mei 1998. kemudian berubah menjadi program dana Jaminan Sosial dan pada tahun 2003 berubah menjadi Dana Kompensasi BBM, pemberian ini dapat berupa langsung, misalnya kompensasi BBM, dan tidak langsung misalnya dana bergulir.³⁶

Dana jaminan sosial bertujuan untuk memberikan perlindungan masa depan bagi keluarga dan kelompok masyarakat miskin, terkena musibah bencana alam, pemutusan hubungan kerja serta menderita akibat perubahan sosial ekonomi, kecelakaan dan korban kejahatan. Atau dengan kata lain program ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari keadaan darurat yang dapat menimbulkan terganggunya pendapatan atau konsumsi mereka akibat perubahan sosial makanya diberikan berbagai bantuan seperti bantuan beras miskin dan dana kompensasi yang berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada rumah tangga miskin.

Dana kompensasi yang berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada rumah tangga miskin adalah sejumlah uang yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang tergolong miskin sebagai kompensasi pengurangan subsidi BBM, yang dituangkan dalam Inpres No. 12 tahun 2005 tentang

³⁵Tulus T. H Tambunan, *Perekonomian Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 131.

³⁶Mulyanto Sumardi, dan Hans Dieter Ever, *Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok*, (Jakarta : Rajawali, 1982), hlm. 7.

pelaksanaan BLT kepada rumah tangga miskin.³⁷

C. Ilmu Dakwah Dalam Masyarakat

1. Ruang Lingkup Ilmu Dakwah

Ilmu Dakwah adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana berdakwah atau mensosialisasikan ajaran Islam kepada objek dakwah (masyarakat) dengan berbagai pendekatan agar nilai-nilai ajaran Islam dapat direalisasikan dalam realitas kehidupan, dengan tujuan agar mendapat ridha Allah SWT. Ilmu Dakwah dapat kategorikan sebagai disiplin ilmu yang mandiri, karena sudah mencakup beberapa hal yang sangat urgen sebagai sebuah ilmu.

Ilmu Dakwah berfungsi memberikan dasar-dasar teoritis dan metodologis. Pembahasan Ilmu Dakwah ini berusaha menginventarisasi beberapa pemikiran tentang dakwah yang ada relevansinya dengan pengayaan kajian dakwah dengan pendekatan filsafat, yang meliputi hal-hal sebagai berikut. Pertama, aspek Ontologi Dakwah Islam. Kedua, aspek Epistemologi Dakwah Islam, yang mendiskusikan wilayah, realitas dan fenomena yang dikaji dalam disiplin Ilmu Dakwah. Ketiga, aspek Aksiologi Ilmu Dakwah yang mengkaji sumber dakwah, metode penalaran dalam merekonstruksi teori dakwah dan struktur keilmuan dakwah.³⁸ Ilmu Dakwah melingkupi pembahasan tentang :

- a. Materi Dakwah (*maaddah al-Dakwah*) yang meliputi bidang akidah, syariah (ibadah dan mu'amalah) dan akhlak.

³⁷Undang-Undang No. 25 Tentang Program Pembangunan Nasional 2000-2004, Pasal 4 Ayat 1.

³⁸Wahidin Saputra, *Pengantar Ilmu Dakwah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2012)., hlm. 7.

- b. Subjek Dakwah (*Da'i*) orang yang aktif melaksanakan dakwah kepada masyarakat.
- c. Objek Dakwah (*Mad'u*) adalah masyarakat atau orang yang didakwahi.
- d. Metode Dakwah (*Thariqoh al-Dakwah*) yaitu cara atau strategi yang harus dimiliki da'i, dalam melaksanakan dakwahnya.
- e. Media Dakwah (*Wasilah al-Dakwah*) adalah media atau instrument yang digunakan sebagai alat untuk mempermudah pesan dakwah kepada mad'u.
- f. Tujuan Dakwah (*Maqashid al-Dakwah*) adalah tujuan yang hendak dicapai oleh kegiatan dakwah.

2. Karakteristik Manusia

Manusia adalah sesuatu yang nyata ada, oleh karena itu tentu dapat dipahami adanya eksistensi manusiawi di samping sisi organik dari segi materialnya. Maka, konsepsi tentang manusia dalam filsafat merupakan suatu problem yang sangat rumit. Manusia dalam kenyataannya bukan sekedar suatu materi yang kompleks, tetapi juga realitas non material (sisi eksistensi manusiawi/ material) dan personalitasnya yang menggabungkan dualitas material dan spiritual.

Sisi material manusia memiliki kualitas-kualitas seperti berat, massa, bentuk dan volume. Sisi material manusia ini tunduk kepada hukum-hukum fisika. Kompleksitas dari sisi material manusia itu meliputi eksistensi fisis, biologis, personal dan social, yang dalam batas-batas tertentu dapat ditemukan pada tingkatan hewani dari kenyataan yang ada. Eksistensi khas yang dimiliki manusia, dengan demikian tidak akan ditemukan jika yang diperhatikan hanya

sisi material manusia semata. Eksistensi khas itu disebut eksistensi manusiawi, dalam arti cara berada yang khas dari manusiawi, terdiri dari interaksi-interaksi dari suatu kumpulan unsur-unsur sebagai hasil dari proses budi. Menurut The Liang Gie ada empat filosof yang dikutipnya, memiliki pendapat yang sama bahwa unsur-unsur eksistensi manusiawi ada empat. Keempat unsur itu adalah seni, kepercayaan, filsafat, dan ilmu.

- a. Seni adalah suatu kegiatan manusiawi yang menjelajahi dan dengan ini menciptakan realitas baru dalam suatu cara yang di luar akal dan berdasarkan penglihatan serta menyajikan realita itu secara pelambang atau kiasan sebagai sebuah kebulatan dunia kecil yang mencerminkan kebulatan dunia besar. Seni adalah proses menciptakan sesuatu yang indah, yang berguna atau mengherankan oleh budi dengan bantuan raga manusia.
- b. Kepercayaan adalah proses menerima dan merasa yakin terhadap adanya sesuatu yang tertinggi yang mempunyai kekuasaan atas alam semesta ini.
- c. Filsafat adalah suatu kegiatan manusiawi yang bersifat reflektif bersandar kepada akal manusia dan sebaian besar tertuju pada pencarian pengetahuan serta akan menghasilkan kearifan, asas-asas yang penghabisan, pemikiran yang sistematis dan pandangan yang menyeluruh.
- d. Ilmu adalah kegiatan menyelidiki oleh budi manusia dengan memakai metode-metode yang diatur dan di kontrol untuk memperoleh sekumpulan fakta yang spesifik yang menghasilkan asas-asas, system-sistem, teori-teori, kaidah-kaidah yang dinamakan pengetahuan ilmiah.

Keempat unsur eksistensi manusiawi itu tidak hanya membuat

manusia menjadi jenis makhluk biologis yang berkembang paling tinggi diantara semua jenis makhluk, melainkan senyatanya telah mengubah manusia menjadi suatu jenis makhluk hidup yang baru.³⁹

D. Sustainable Development Goals (SDGs)

Dalam konteks pembangunan ekonomi, apalagi bila dibandingkan dengan negara- negara lain, posisi Indonesia digolongkan sebagai negara berkembang. Sebagai negara berkembang, Indonesia dianggap sebagai negara yang memiliki tingkat kemakmuran yang masih rendah bila dibandingkan dengan negara-negara maju. Namun, bila melihat secara umum, potensi sumber alam negeri ini yang meliputi bidang agraris dan maritim Indonesia boleh dikatakan sebagai negeri yang kaya raya. Meskipun dari sisi pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita masih jauh dibawah negara-negara maju.

Seperti yang diungkapkan oleh Adi Sasono dalam salah satu bukunya, bahwa dinamika pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini, telah menghasilkan pertumbuhan tinggi untuk sekelompok kecil orang, kemiskinan untuk banyak orang, dan ketergantungan asing untuk seluruh masyarakat. Pertumbuhan tinggi yang dinikmati sekelompok kecil orang, tatkala 40 orang terkaya Indonesia menguasai 10 persen Produk Domestik Bruto (PDB) kita, merupakan pertumbuhan dengan tingkat pemusatan aset produktif dan kekayaan yang sangat tinggi.³ Secara makro dengan kondisi perekonomian seperti yang digambarkan di atas merupakan kondisi yang sangat meprihatinkan dimana ketimpangan sudah secara terang benderang terlihat dalam kehidupan keseharian kita sebagai bangsa.

³⁹Muhammad Sulthon, *Desain Ilmu Dakwah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003)., hlm. 67-68.

Pembahasan dalam tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan dan memahami konsep *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam mewujudkan pembangunan berkeadilan. Hal ini juga mencakup apa saja yang dapat dilakukan dalam menjawab problem kemiskinan, ketimpangan, dan kerusakan lingkungan. Selain itu, tulisan ini juga bertujuan untuk memberikan deskripsi bagaimana partisipasi berbagai pihak khususnya kaum muda dapat berperan mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Sementara itu, manfaat dari tulisan ini yakni, memberikan kerangka teoretis dalam meluruskan orientasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah khususnya dari aspek ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan. Selain itu, juga dapat memberikan masukan bagi arah kebijakan-kebijakan pembangunan ekonomi pemerintah agar lebih adil dan berorientasi pada keberlanjutan.

Wacana pembangunan berkelanjutan bukanlah merupakan isu yang baru terdengar. Jika menelaah siklus investasi, produksi, dan konsumsi yang berlangsung dan dilakukan dalam skala besar maka jangka panjangnya akan menimbulkan pertanyaan besar bagi kelangsungan alam dan kehidupan manusia. Dalam konteks inilah, gagasan pembangunan berkelanjutan ini muncul dan menjadi pendekatan yang disarankan.

Secara sederhana, pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) didefinisikan sebagai *-development which meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs*!. Istilah ini pertama kali dipopulerkan dalam *Our Common Future*, sebuah laporan dalam yang dipublikasikan oleh Komisi Dunia untuk Lingkungan Hidup

dan Pembangunan *the world Commission on Environment and Development* (WCED) pada tahun 1987.

Sejak kemunculannya, pembangunan berkelanjutan mempunyai banyak definisi dan konsep itu pun menjadi cair. Meskipun demikian, beberapa hal prinsipil mendapatkan penekanan. *Pertama*, komitmen pada keadilan dan *fairness*, dimana prioritas seyogyanya diberikan kepada masyarakat dunia yang paling miskin dan keputusan seharusnya mempertimbangkan hak-hak generasi yang akan datang. *Kedua*, sebagai suatu pandangan jauh ke depan (*long-term*) yang menekankan prinsip-prinsip precautionary, yaitu dimana ada ancaman serius atau sesuatu yang tidak bisa dicegah, kekurangan kepastian pengetahuan secara penuh seyogyanya tidak digunakan sebagai alasan untuk menunda ukuran-ukuran biaya efektif (*cost-effective measures*) guna mencegah degradasi lingkungan. *Ketiga*, pembangunan berkelanjutan mengintegrasikan, dan memahami, sekaligus bertindak dalam kesalinghubungan yang kompleks yang ada di antara lingkungan, ekonomi, dan masyarakat. Lingkungan, pembangunan ekonomi, dan keadilan sosial ini menjadi tiga pilar utama pembangunan berkelanjutan.

Atas dasar tersebutlah kemudian melandasi sebuah upaya untuk membangun sebuah konsep pembangunan berkelanjutan yang diinisiasi oleh PBB. Pada tahun 2000, secara resmi digagas *Millenium Development Goals* (MDGs) atau tujuan pembangunan milenium yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat pada 2015, dengan berbagai tujuan dan target yakni :

1. Memberantas Kemiskinan dan Kelaparan ekstrim
2. Mewujudkan pendidikan dasar untuk semua
3. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
4. Menurunkan angka kematian anak
5. Meningkatkan kesehatan ibu
6. Memerangi HIV/ AIDS, malaria dan penyakit lainnya
7. Memastikan kelestarian lingkungan
8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan⁴⁰

Kedelapan tujuan tersebut bila melihat pencapaian pembangunan yang telah mencapai batas waktu yakni tahun 2015, mungkin masih banyak hal yang belum tercapai sepenuhnya. Adapun pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang berlandaskan pada MDGs ternyata mendapat sorotan dan kritikan. Kritik-kritik tersebut antara lain tujuan dan target MDGs disusun melalui proses yang sangat birokratis dan teknokatis. *Kedua*, desain dari tujuan dan target tersebut juga dikritik oleh beragam perspektif. Sebagai misal, tidak ada perhatian yang cukup terhadap persoalan ketimpangan dan kesetaraan gender dalam tujuan-tujuan MDGs. Ketiga, tujuan, target, dan indikator yang ada merefleksikan fokus area dan data yang diasumsikan tersedia, namun dalam beberapa kasus data tersebut ternyata tidak lengkap atau bahkan tidak ada. Keempat, kurangnya akuntabilitas dan universalitas terutama untuk negara-negara donor dalam memenuhi tujuan ke-8 dari MDGs.

⁴⁰Muhammad Fardan Ngoyo, *Mengawal Sustainable Development Goals (SDGs) Meluruskan Orientasi Pembangunan yang Berkeadilan*, Jurnal Sosioreligius Volume I No. 1 Juni 2015., hlm. 78-82.

E. Teori Kritis

Jurgen Habermas adalah salah seorang tokoh dari Filsafat Kritis. Ciri khas dari filsafat kritisnya adalah, bahwa ia selalu berkaitan erat dengan kritik terhadap hubungan- hubungan sosial yang nyata. Pemikiran kritis merefleksikan masyarakat serta dirinya sendiri dalam konteks dialektika struktur-struktur penindasan dan emansipasi. Filsafat ini tidak mengisolasi diri dalam menara gading teori murni. Pemikiran kritis merasa diri bertanggung jawab terhadap keadaan sosial yang nyata.

Aliran pemikiran kritis ini mulai berkembang sekitar tahun dua puluhan. Tokoh- tokohnya antara lain Georg Lukacs, Karl Korsch, Ernst Bloch, Antonio Gramsci dan seterusnya. Salah satu aliran dalam pemikiran kritis adalah Teori Kritis Masyarakat. Teori Kritis ini dikembangkan sejak tahun 30-an oleh tokoh- tokoh yang semula bekerja di Institut fur Sozialforschung pada Universitas Frankfurt. Mereka itu adalah Marx Horkheimer, Theodor W. Adorno dan Herbert Marcuse serta anggota-anggota lainnya. Kelompok ini kemudian dikenal dengan sebutan “Mazhab Frankfurt”.

Jurgen Habermas adalah pewaris dan pembaharu Teori Kritis. Meskipun ia sendiri tidak lagi termasuk Mazhab Frankfurt, arah penelitian Habermas justru membuat subur gaya pemikiran “Frankfurt” itu bagi filsafat dan ilmu-ilmu sosial pada umumnya. Uraian singkat ini akan mencoba menelusuri perkembangan dapat dikatakan pemikirannya.⁴¹

⁴¹Frans Magnis-Suseno, *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*, (Yogyakarta: Kansius, 1992)., hlm. 176.

F. Kajian Terdahulu

Diantara penelitian terdahulu yang mendukung penulis untuk meneliti tentang Proses Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Di Desa Gunung Hasahatan Kecamatan Padang Sidempuan antara lain:

1. Analisis Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kartasura tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan penanganan kemiskinan di Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kartasura. Dari hasil penelitian maka dapat ditemukan bahwa Implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) berjalan kurang baik secara umum hal ini dapat dilihat dari sosialisasi yang diberikan belum merata masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui prosedur syarat serta kriteria masyarakat yang mendapatkan Bantuan Langsung Tunai tersebut. Dalam hal pengawasan program ini belum berjalan dengan baik.⁴²
2. Analisa Masalah Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masyarakat Miskin di Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur, dimata masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) uang bantuan tersebut hanya dinilai sebagai uang pembeli sembako, masyarakat menilai bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah pemberian secara Cuma-Cuma oleh pemerintah oleh karena itu menurut mereka penerima BLT belum bisa sejahtera dengan hanya mengandalkan BLT. Tokoh masyarakat maupun pemerintah desa sama-sama memiliki pandangan bahwa pemberian BLT bersikap pasif, karena hanya menunggu pemberian dari pemerintah yang dapat

⁴²Nugroho Kusuma, *Skripsi Analisis Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kartasura.*

menumbuhkan budaya kemiskinan.⁴³

3. Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid 19 di Desa Sermong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat. Faktor penghambat kebijakan Bantuan Langsung Tunai pada masyarakat miskin yaitu sumber daya manusia dan disposisi yang dimiliki pemerintah Desa. Faktor pendukung Kebijakan Bantuan Langsung Tunai pada masyarakat miskin yaitu struktur birokrasi dan data dalam pembagian atau penyaluran BLT umumnya menggunakan data sebagai bahan pertimbangan. Dari sisi ketepatan menentukan pilihan, pemerintah Desa sudah bekerja sesuai dengan prosedur, mengenai adanya dugaan nepotisme dalam penentuan penerima BLT.⁴⁴

⁴³Sonia Dwi Prastiti, *Skripsi Analisa Masalah Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masyarakat Miskin di Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur*.

⁴⁴Anwar Ibrahim, *Skripsi Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid 19 di Desa Sermong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat*.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Gunung Hasahatan, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua yang merupakan salah satu desa yang menerima Bantuan langsung Tunai di Kota Padangsidimpuan. Mata pencaharian sebagian besar warga di Desa Gunung Hasahatan adalah sebagai Petani. Waktu penelitian ini dilaksanakan mulai dari penelitian Proposal bulan Januari 2021 hingga Maret 2022.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif biasa disebut penelitian lapangan (*Field research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.⁴⁵ Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan penelitian ilmiah (*research*) adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis, objektif, dan logis dengan mengendalikan atau tanpa mengendalikan berbagai aspek/variable yang terdapat dalam fenomena, kejadian, maupun fakta yang diteliti untuk dapat menjawab pertanyaan atau masalah yang diselidiki.⁴⁶

⁴⁵Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cerakan 1 (Jawa Barat : CV Jejak, 2018), hlm. 7.

⁴⁶A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Cetakan 4 (Jakarta : Kencana, 2017), hlm. 26.

Penelitian ini penelitian yang menghasilkan tindakan deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan, perilaku atau tindakan dari orang-orang yang dapat diamati.⁴⁷ Moh. Natsir menjelaskan bahwa meneliti status kelompok manusia, suatu kondisi, suatu sistem, pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.⁴⁸ Adapun pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan struktural dan kekeluargaan. Mendeskripsikan gejala, peristiwa yang terjadi saat penelitian berlangsung.⁴⁹

Pendekatan struktur yang peneliti maksudkan adalah mendekati subjek primer dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan memanfaatkan para pendamping sebagai bagian dari struktur program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Pendekatan kekeluargaan dengan menggunakan bahasa-bahasa adat istiadat pada pertemuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan pendamping pada acara-acara tertentu dengan menumpang para pendamping saat mereka terjun ke lapangan.

C. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang masalah atau keadaan yang sebenarnya. Untuk memperoleh data dan informasi maka dibutuhkan informan dalam hal ini adalah orang yang dapat diwawancarai, diminta informasi oleh pewawancara, jumlah informan bukanlah kriteria utama,

⁴⁷Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian (Bandung : Remaja Rosda, 1996)*, hlm. 64.

⁴⁸Moh. Natsir, *Metode Penelitian* (Jakarta : Ghaliya Indonesia, 1998), hlm. 63.

⁴⁹Nana Sudjana, *Penelitian & Penilaian Pendidikan* (Bandung : Sinar Baru, 1989), hlm.

akan tetapi lebih dibutuhkan kepada sumber data yang dapat memberikan informasi sesuai yang diinginkan dan yang dituju peneliti.⁵⁰

Dalam hal penelitian ini, maka yang menjadi informan penelitian ini adalah pendamping program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Gunung Hasahatan Kecamatan Padangsidempuan Batunadua. Maka peneliti menggunakan teknik *random sampling* yaitu setiap orang yang memberikan informasi berkedudukan sama dari segi-segi yang akan diteliti.⁵¹

D. Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu :

1. Sumber data primer, sumber data utama adalah 5 (lima) orang pendamping program Bantuan Langsung Tunai (BLT), 40 (empat puluh) orang penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan 4 (empat) orang yang tidak menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) sehingga menjadi 48 (empat puluh delapan) orang dengan tehnik *random sampling*.
2. Sumber data sekunder, yaitu sumber yang dapat melengkapi data-data yang diperlukan yaitu dari Kepala Desa yang dipandang cukup memberi penjelasan, tetangga penerima manfaat dan tokoh masyarakat.

⁵⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta : Rineca Cipta, 2016), hlm. 155.

⁵¹Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1989), hlm. 57.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan beberapa metode sehingga data didapat seperlunya dengan cara :

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam hubungan tersebut.⁵² Menurut Moleong observasi atau pengamatan dibedakan menjadi dua yaitu pengamatan berperan serta dan tidak berperan serta (non partisipan). Dalam pengamatan tidak berperan serta hanya mengamati. Sedangkan pengamatan berperan serta, selain mengamati juga menjadi anggota dari objek yang diamati.⁵³

Berdasarkan pendapat tersebut, penelitian ini menggunakan observasi non partisipan dalam mengamati kondisi-kondisi dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM), mengamati situasi kegiatan atau aktifitas mereka keseharian, dengan adanya keluarga dan teman yang sedikit banyaknya dapat mengetahui Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan dapat bercerita pada peneliti.

2. Wawancara Mendalam / *Deaf Interview*

Wawancara mendalam ini ditujukan utama pada para pendamping program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan bersedianya Bapak/Ibu para pendamping memberikan penjelasan kapan dan dimana saja sebatas kepatutan sehingga strategi komunikasi tetap lancar antara peneliti dengan pendamping.

⁵²Salamat Triono Ahmad, *Metodologi Penelitian* (Medan : Indah Grafika, 2007), hlm. 161.

⁵³Lexy J. Moleong, *Op.Cit.*, hlm. 127.

Selain pendamping, ada juga anggota dari setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari 40 (empat puluh) rumah tangga dan 5 Keluarga yang tidak menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dipilih dengan teknik *random sampling* (sampling acak) yang dipertimbangkan sebelumnya karena mereka lebih mampu menjelaskan jawaban-jawaban wawancara apalagi merekalah yang langsung menerima, merasakan, menggunakan dan lebih objektif dan aktif menyahuti hal-hal yang diteliti.⁵⁴

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan peristiwa yang sudah berlalu, bisa berbentuk gambar, foto-foto, karya-karya, aktifitas yang dimonumentalkan dari seseorang atau kantor, lembaga⁵⁵ yang berkaitan pelaksanaannya Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Gunung Hasahatan Kecamatan Padangsidempuan Batunadua.

Dokumentasi adalah mencari data tentang hal-hal variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, jurnal, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya untuk melengkapi data perolehan lewat observasi dan wawancara. Peneliti mengumpulkan dokumentasi berupa Permensos, jurnal, kopian buku kerja pendamping dan operator Bantuan Langsung Tunai (BLT), catatan lapangan dan rekaman dalam kaitannya dengan pengumpulan data penelitian.

⁵⁴Wardi Bachtiar, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*. Cet. Ke 1 (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 72.

⁵⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Cet. Ke 17 (Bandung : Al-fabeta, 2012), hlm. 240.

F. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.⁵⁶ Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul lalu diolah dan di klasifikasi berdasarkan jenisnya. Adapun langkah-langkah pengolahan dan analisis data dimaksud adalah :

1. Menyeleksi data dan mengelompokkannya sesuai dengan topik-topik pembahasan.
2. Menyusun redaksi data dalam kalimat yang jelas.
3. Mendeskripsikan data secara sistematis sesuai dengan yang dibahas.
4. Menarik kesimpulan dari seluruh pembahasan yang diteliti.⁵⁷

Dengan demikian, data yang diperoleh berdasarkan pengamatan dibandingkan dengan data wawancara memakai pisau analisis agar peneliti mengetahui validitas masing-masing dan demikian juga data yang dapat dari Kepala Desa, Keluarga, Tokoh Agama dan teman dibanding cocokkan dengan data lainnya.

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif diperlukan keabsahan data. Adapun teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ada Sembilan yaitu perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensial, kajian kasus negatif, pengecekan anggota, uraian rinci, dan auditing. Sedangkan teknik keabsahan data yang

⁵⁶Masri Singarimbu dan Sopian Efendi, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta : LP3ES, 1989), hlm. 263.

⁵⁷Lexy J. Moleong., *Op.Cit.*, hlm. 190.

digunakan dalam penelitian ini ialah perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan dan triangulasi.

1. Perpanjangan keikutsertaan (*Prolonged Engagement*)

Agak sulit mempercayai hasil penelitian kualitatif jika peneliti hanya sekali datang ke lapangan. Walaupun dengan dalih waktu yang digunakan seharian penuh di lapangan. Dalam hal ini peneliti perlu memperpanjang pengamatannya karena jika hanya sekali datang ke lokasi penelitian akan sulit mendapatkan *link* atau *chemistry* dengan para partisipan. Lama perpanjangan pengamatan tergantung pada kedalaman, keluasan, dan kepastian data. Kedalaman artinya apakah peneliti ingin menggali data lebih mendalam lagi hingga diperoleh makna di balik yang tampak tersebut. Artinya, segala sesuatu belum dapat dimaksimalkan jika dilakukan dalam satu kali.

2. Ketekunan Pengamatan (*Persistent Engagement* atau *Observation*)

Ketekunan pengamatan bermaksud menunjukkan kegigihannya dalam mengejar data yang sudah diperoleh untuk lebih diperdalam dan hal yang belum ada terus diupayakan keberadaannya. Dengan meningkatkan ketekunan dan kegigihan, berarti peneliti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Upaya peneliti untuk memperdalam dan memperinci temuan setelah data dianalisa. Peneliti harus melakukan pengecekan ulang apakah temuan sementara sesuai dan menggambarkan konteks penelitian yang spesifik.

3. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara memeriksa ulang data. Pemeriksaan ulang dapat dilakukan sebelum dan atau sesudah data dianalisis. Pemeriksaan dengan cara triangulasi dilakukan untuk meningkatkan derajat kepercayaan dan akurasi data. Triangulasi dilakukan dengan tiga strategi, yaitu triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi waktu. Melalui triangulasi sumber, peneliti mencari informasi lain tentang topik yang dikajinya dari sumber atau partisipan lain. Pada prinsipnya, semakin banyak sumber maka akan semakin baik hasilnya.⁵⁸

⁵⁸Helaluddin, Hengki Wijaya, *Analisa Data Kualitatif*, (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), hlm 134-135.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian

1. Profil Desa Gunung Hasahatan Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua

Desa Gunung Hasahatan merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Provinsi Sumatra Utara dengan luas wilayah 5 Ha. Secara administratif Desa Gunung Hasahatan terdiri dari 1 (satu) Lingkungan. Adapun jumlah penduduk di Desa Gunung Hasahatan sejumlah 447 jiwa dengan jumlah penduduk dewasa 317 jiwa, jumlah laki-laki 220 jiwa, jumlah perempuan 227 jiwa, dan jumlah kepala keluarga sebanyak 139 KK.

Secara geografis batas-batas Desa Gunung Hasahatan adalah sebagai berikut: di sebelah Utara berbatasan dengan Desa Simanombang, di sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Ujunggurap, di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Aek Najaji, dan disebelah Timur berbatasan dengan Desa Purwodadi.⁵⁹

2. Visi Dan Misi Desa Gunung Hasahatan

a. Visi

Mewujudkan masyarakat Desa Gunung Hasahatan yang sejahtera, mandiri, berbudaya dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta pembangunan yang merata.

⁵⁹Dokumen Desa Gunung Hasahatan Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua dari Kantor Kepala Desa 10 Oktober 2021.

b. Misi

- 1) Pembangunan sumber daya manusia dengan mengalokasikan dana desa untuk kegiatan bimtek atau pelatihan-pelatihan ekonomi kreatif bagi masyarakat
- 2) Mempercepat pembangunan infrastuktur jalan untuk meningkatkan akses perekonomian masyarakat.
- 3) Penggunaan dana Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang terbuka dan berbasis kepentingan rakyat dalam bidang transportasi jalan, fasilitas pendidikan, kesehatan dan sarana prasarana yang lain.
- 4) Menciptakan tatanan sosial budaya masyarakat Desa Gunung Hasahatan yang hidup rukun, santun, damai dan berbudi pekerti yang luhur sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang nyaman dan sejahtera.⁶⁰

3. Struktur Organisasi Desa Gunung Hasahatan

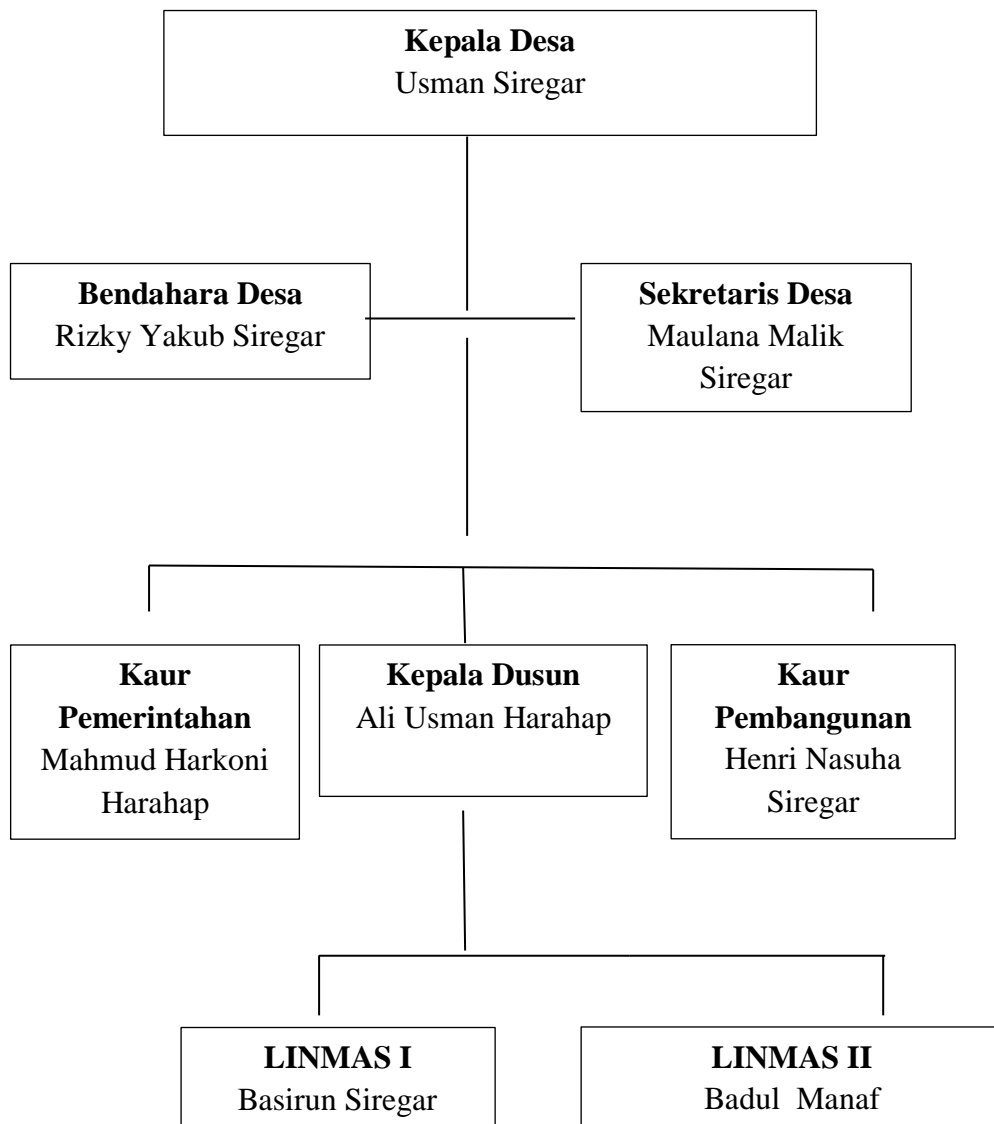
Struktur organisasi merupakan gambaran atau struktur lembaga yang ada dalam suatu organisasi yang telah dibuat dan disusun secara sederhana untuk memperlihatkan wewenang dan tanggung jawab yang baik secara sederhana. Berkaitan dengan hal ini, adapun struktur organisasi dari Pemerintah Desa Gunung Hasahatan dapat dipahami dalam gambar sebagai berikut di bawah ini.

⁶⁰Dokumen Desa Gunung Hasahatan Kecamatan Padangsidempuan Batunadua dari Kantor Kepala Desa 10 Oktober 2021.

Struktur Organisasi Pemerintahan

Desa Gunung Hasahahatan Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua

Tahun 2021



Sumber: Dokumen penelitian di Desa Gunung Hasahahatan 10 Oktober 2020-2021.

Adapun tugas dan tanggung jawab dari setiap struktur pemerintah Desa Gunung Hasahatan Kecamatan Padangsidempuan Batunadua dapat dipahami sebagai berikut:

a. Kepala Desa

Kepala Desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa, yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Kepala Desa memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan pemerintahan Desa seperti penetapan peraturan desa, pembinaan masalah pertanahan, ketentraman dan ketertiban, upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah.
- 2) Melaksanakan pembangunan seperti pembangunan sarana dan prasarana pedesaan, pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan.
- 3) Pembinaan kemasyarakatan seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.
- 4) Pemberdayaan masyarakat seperti sosialisasi dan motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna.

5) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

b. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa, yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Sekretaris Desa memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
- 2) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- 3) Pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber pendapatan dan pengeluaran.
- 4) Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, monitoring dan evaluasi program, serta menyusun laporan.

c. Bendahara Desa

Bendahara Desa berkedudukan sebagai penata usahaan yang meliputi penyimpanan, penyetoran, pembayaran keuangan pedesaan. Bendahara desa memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Menerima, menyetorkan atau membayar, menatausahakan keuangan Desa.

- 2) Mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB (Anggaran Pendapatan Pelanja) Desa.

4. Penduduk Desa Gunung Hasahatan

Jumlah penduduk yang berdomisili di Desa Gunung Hasahatan Kecamatan Padangsidempuan Batunadua adalah sebanyak 447 jiwa yang terdiri dari 139 kepala keluarga (KK). Untuk lebih jelasnya dapat dipahami dalam tabel berikut ini.

Tabel I
Data Penduduk di Desa Gunung Hasahatan Kecamatan Padangsidempuan Batunadua

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-laki	220
Prempuan	227
Jumlah	447

Sumber: Dokumen Desa Gunung Hasahatan 2020-2021.

5. Mata Pencaharian Masyarakat Penerima BLT

Masyarakat Desa Gunung Hasahatan memiliki mata pencaharian yang beragam di antaranya petani, pedagang, karyawan, pegawai dan lain sebagainya. Mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Gunung Hasahatan adalah sebagai petani. Untuk lebih jelasnya dapat dipahami dalam tabel dibawah ini.⁶¹

Tabel II
Mata Pencaharian Penduduk Penerima BLT Desa Gunung Hasahatan Kecamatan Padangsidempuan Batunadua

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Tidak Bekerja	3
2	Petani	34

⁶¹Mahmud Harkoni Harahap, KASI Pemerintahan Desa Gunung Hasahatan, Wawancara, 23 Oktober 2021, Pukul 11.00 WIB.

3	Pedagang	2
4	Lain-lain (Jasa, Swasta)	5
	Jumlah	40

Sumber: Dokumen Desa Gunung Hasahatan 2020-2021

B. Temuan Khusus

1. Proses Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Desa Gunung Hasahatan Kecamatan Padangsidempuan Batunadua

Secara kongkrit upaya peningkatan kesejahteraan rakyat berlandaskan sistem ekonomi kerakyatan perlu dilakukan dalam program pembangunan lintas sektoral. Di antaranya adalah melalui berbagai upaya dalam rangka penanggulangan kemiskinan ketenaga kerjaan, pemberdayaan usaha mikro, menengah, koperasi, pembangunan pertanian, pangan dan pengairan, pembangunan sarana dan prasarana pedesaan serta berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam lingkungan hidup.

Oleh karena itu mulai tahun 2005 pemerintah mengadakan suatu program bantuan rakyat. Program itu antaranya, Dana Kompensasi BBM, Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang berupa bentuk uang yang disalurkan langsung kepada masyarakat miskin, dalam proses penyaluran ini bantuan yang di salurkan kepada masyarakat tidak ada potongan besaran dana bantuan yang diserahkan sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Bantuan pemerintah terhadap suatu daerah khususnya masyarakat miskin supaya terarah/tetapat sasaran penerimanya harus mempunyai pengelompokan kinerja agar lebih terfokus. Dalam hal ini pengelompokan kinerja peroses penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) perlu kiranya memuat 3 hal, yaitu Manajemen, Adminstrasi, Pendistribusian.

a. Manajemen

Manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan. Sumber daya organisasi yang dimaksud adalah seluruh asset yang dimiliki oleh organisasi, baik manusianya dan keterampilannya.⁶²

Adapun dasar diperlukannya manajemen :

- 1) Untuk mencapai tujuan.
- 2) Untuk menjaga keseimbangan diantara tujuan-tujuan yang saling bertentangan.
- 3) Untuk mencapai efisiensi dan efektifitas.

Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Bapak Usman Siregar, Selaku Kepala Desa Gunung Hasahatan.

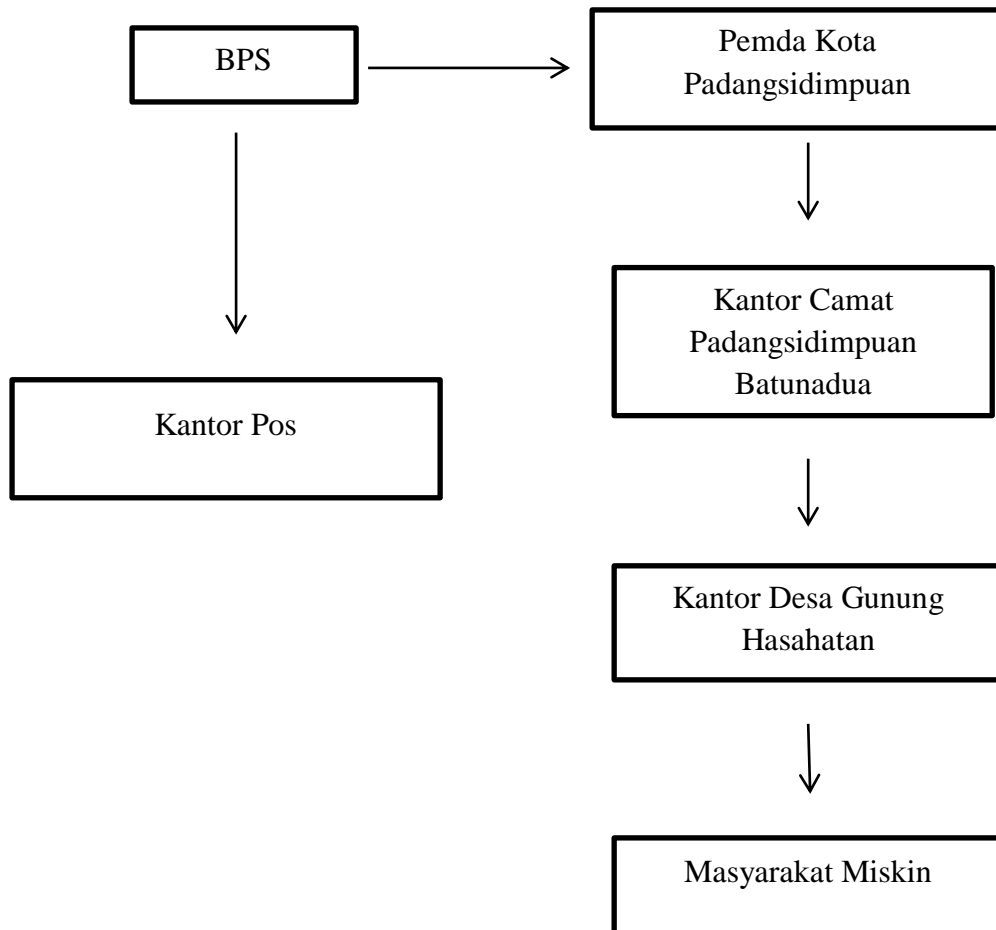
“Begitu juga dalam proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT), ini diperlukan suatu manajemen yang tepat. Kegiatan perlu dirancang sedemikian rupa sehingga akan menghasilkan yang baik dan memuaskan. Karena kegiatan ini menyangkut kemaslahatan masyarakat miskin yang membutuhkan. Dana Bantuan ini harus tepat sasaran”.⁶³

Pelaksanaan proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Desa Gunung Hasahatan membutuhkan struktur yang tepat. Hal ini merupakan salah satu unsur dari manajemen, Dalam proses penyaluran ini bantuan harus tersalur kepada masyarakat secara efisien guna untuk mencegah

⁶²John Suprihanto, *Manajemen*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2014), hlm 4.

⁶³Usman Siregar, Kepala Desa Gunung Hasahatan, Wawancara, 17 Oktober 2021, Pukul 19.00 WIB.

terjadinya konflik dan tanda tanya di masyarakat. Adapun bagan proses-proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT):



Sumber : Kantor Desa Gunung Hasahatan 17 Oktober 2020- 2021.

Dari struktur atau bagan di atas dapat dilihat bahwa BPS dan kantor Pos yang mempunyai peran utama dalam masalah BLT ini akan mengadakan proses penyaluran BLT, BPS kabupaten membentuk tim penyaluran KKB di tingkat kabupaten dan kecamatan. Masing-masing di fasilitasi oleh Bupati/Walikota, Camat, Kepala Desa dan Aparat Desa. Kantor Pos tersebut melakukan penarikan dana dari Bank SUMUT Pusat

dan menyalurkan dana tersebut kepada rumah tangga miskin sesuai dengan data yang ada Kantor Pos tersebut dan penyaluran dana oleh Kantor Pos dilakukan setelah Kantor Pos melakukan verifikasi mengenai kebenaran dan keabsahaan data yang diterima.

Dalam hal ini yang mempunyai peran langsung terhadap proses penyaluran BLT adalah BPS, Kantor Pos, dan Kepala Desa beserta Aparat Desa, masyarakat miskin yang terdaftar dan mempunyai KKB mengambil di Balai Desa yang dibagikan oleh kepala Desa dan Aparat Desa. Dalam hal ini Kepala Desa Sangat berperan untuk pembagian Bantuan Langsung Tunai ini untuk memudahkan dan membantu masyarakat miskin karena Kantor Pos itu hanya ada di Kecamatan, sehingga masyarakat sulit juga untuk mengambilnya langsung mengingat transportasi dari desa ke kecamatan lumayan jauh dan belum lancar.

Jadi dalam proses penyaluran ini Kepala Desa Gunung Hasahatan terlibat langsung dalam proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT).

b. Administrasi

Masyarakat yang mendapatkan bantuan langsung tunai dari pemerintah khususnya harus terdaftar pada BPS dan mempunyai Kartu Kompensasi BBM (KKB). Jumlah bantuan yang disalurkan kepada masyarakat sebanyak Rp. 300.000/Bulan dalam satu Rumah Tangga, proses penyaluran ini dilakukan per 3 bulan sekali, Dalam hal ini proses penyalurannya tidak ada pemotongan dana bantuan yang disalurkan sesuai dengan besaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Dapat dilihat yang

mendaftarkan masyarakat tersebut adalah hasil pendataan BPS terhadap masyarakat miskin bersama RT/RW sebagai pemimpin terkecil di dalam lingkungan masyarakat.

Masyarakat yang mendapatkan bantuan BLT di Desa Gunung Hasahatan tidaklah semua, melainkan bagi mereka benar-benar miskin dan membutuhkan. Karena kriteria yang ditetapkan pemerintah tidak cocok di lapangan, maka pemerintahan desa setempat mengambil suatu kebijakan dalam penetapan kriteria penerima BLT dengan mengadakan penyeleksian, yang terdaftar atau menerima KKB tetap menerima namun dibagi sesuai dengan kesepakatan penerima yang memiliki KKB dan kepala Desa Gunung Hasahatan di karenakan sebagian masyarakat miskin tidak terdaftar akan tetapi ia betul-betul membutuhkan. Ketidak terdaftaran sebagian masyarakat disebabkan oleh data lama yang dipakai oleh BPS namun penduduk semakin bertambah yang miskin maupun yang baru menjadi penduduk Desa Gunung Hasahatan.

Hal ini sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Bapak Maulana Malik Siregar selaku Sekdes Desa Gunung Hasahatan dan pernyataan ini juga dikuatkan oleh Keputusan Presiden RI No. 12 tahun 2005, tentang pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) di seluruh Indonesia dan Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga sangat miskin, Rumah Tangga miskin, dan Rumah Tangga hampir miskin diseluruh wilayah Indonesia.

“Penyeleksian dapat menggunakan beberapa kriteria atau syarat, sesuai dengan hasil musyawarah dan kesepakatan dengan berlandaskan peraturan yang ada”⁶⁴.

Adapun Kriteria atau Syarat Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah sebagai berikut:

- 1) Masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan yang tetap atau pekerjaan lepas.
- 2) Masyarakat yang mempunyai pekerjaan tetap, tetapi penghasilannya tidak tetap. Seperti petani penyadap karet, pekerjaan mereka tetap tapi penghasilannya tergantung dengan musim yang ada.
- 3) Masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan karena kondisi fisiknya, seperti udzur, cacat, sakit.
- 4) Masyarakat yang pendapatannya kurang sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.
- 5) Masyarakat yang memiliki anggota keluarga banyak.⁶⁵

c. Pendistribusian atau Penyaluran

Adapun proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Gunung Hasahatan dilakukan secara langsung oleh Pemerintahan Desa, Hal ini disampaikan oleh Bapak Rizki Yaqub Siregar selaku Bendahara Desa Gunung Hasahatan.

“Supaya tidak menimbulkan konflik maupun keributan, maka kami sebagai aparat Desa melakukan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini secara langsung di kator Balai Desa Gunung

⁶⁴Maulana Malik Siregar, Sekretaris Desa Gunung Hasahatan, Wawancara, 21 Oktober 2021, Pukul 10.30 WIB.

⁶⁵Maulana Malik Siregar, Sekretaris Desa Gunung Hasahatan, Wawancara, 21 Oktober 2021, Pukul 10.30 WIB.

Hasahatan”.⁶⁶

Untuk pengambilan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kantor Balai Desa ini sebagaimana yang diungkapkan Bapak Basirun Siregar dan Bapak Badul Manaf selaku LINMAS di Desa Gunung Hasahatan tidak mengalami kesulitan karena masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) disuruh antri dan dipanggil sesuai dengan data yang ada pada Aparat Desa.⁶⁷

Bantuan ini disalurkan kepada masyarakat yang telah terdaftar sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan jumlah yang telah ditetapkan tanpa ada pengurangan, hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Hisla Murni.

“Saya bersyukur sekali dengan adanya Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini, dengan adanya BLT ini saya bisa menambah modal usaha dagangan saya dan menggunakan sebagian uangnya untuk keperluan sekolah anak saya”.⁶⁸

Hal ini juga dinyatakan oleh Bapak Jakpar Harahap.

“Bantuan Langsung Tunai (BLT) sangat membantu perekonomian saya sebagai masyarakat penyadap karet yang tidak tentu penghasilannya, uang dari BLT ini saya gunakan untuk membeli perlengkapan dapur dan sebagian lagi untuk biaya sekolah anak-anak saya”.⁶⁹

Hal ini juga di dukung oleh Ibu Berlian Siregar sebagai masyarakat lansia yang tidak memiliki pekerjaan.

“Alhamdulillah dengan adanya BLT ini saya sangat bersyukur sekali,

⁶⁶Rizki Yaqub Siregar, Bendahara Desa Gunung Hasahatan, Wawancara, 22 Oktober 2021, Pukul 21.00 WIB.

⁶⁷Basirun Siregar dan Badul Manaf, LINMAS Desa Gunung Hasahatan, Wawancara, 23 Oktober 2021, Pukul 17.00 WIB.

⁶⁸Hislah Murni, Warga yang menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Gunung Hasahatan, Wawancara, 23 Oktober 2021, Pukul 20.30 WIB.

⁶⁹Jakpar Harahap, Warga yang menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Gunung Hasahatan, Wawancara, 23 Oktober 2021, Pukul 21.00 WIB.

saya sebagai salah satu warga masyarakat di Desa Gunung Hasahatan yang telah lanjut usia yang tidak memiliki pekerjaan. Uang dari Bantuan ini saya gunakan untuk memenuhi kehidupan saya sehari-hari”⁷⁰.

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini bertujuan untuk membantu perekonomian masyarakat miskin sehingga bantuan ini diharapkan mempunyai peranan yang dalam membantu kehidupan ekonomi masyarakat miskin. Adapun peranan BLT dalam membantu kehidupan ekonomi masyarakat menurut responden antara lain: Sangat baik, baik, cukup baik, tidak baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Beberapa warga menyatakan tidak setuju dengan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini, hal ini sesuai dengan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Masliana selaku warga Desa Gunung Hasahatan yang tidak mendapatkan / menerima BLT tersebut.

“Saya sebagai warga Desa Gunung Hasahatan sangat kecewa terhadap Aparat Desa yang kurang teliti dalam melakukan pendataan terhadap penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini, saya juga masyarakat kurang mampu, rumah saya masih ngontrak, dan sumber penghasilan juga tidak tetap. Saya sangat berharap sekali bisa menikmati BLT ini tapi karena kelalaian Aparat Desa dalam melakukan pendataan jadi saya tidak terdaftar”⁷¹.

Hal ini ini juga didukung oleh pernyataan Ibu Rosmini.

“Saya sangat berharap dengan adanya program Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini bisa membantu perekonomian saya, guna untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah anak-anak saya, akan tetapi harapan saya sia-sia dimana saya tidak terdaftar sebagai salah satu penerima program pemerintah ini”⁷².

⁷⁰Berlian Siregar, Warga yang menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Gunung Hasahatan, Wawancara, 24 Oktober 2021, Pukul 10.00 WIB.

⁷¹Masliana, Warga yang tidak menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Gunung Hasahatan, Wawancara, 25 Oktober 2021, Pukul 09.00 WIB.

⁷²Rosmini, Warga yang tidak menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Gunung Hasahatan, Wawancara, 25 Oktober 2021, Pukul 11.00 WIB.

Pernyataan ini juga disampaikan oleh Ibu Asmawati.

“Saya berharap adanya keadilan dari Pemerintah Desa dan adanya kebijakan, karena kelalaian saya sebagai masyarakat tidak mendapatkan dan tidak menerima bantuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah itu. Saya selaku warga berharap sekali bisa menikmati bantuan ini tapi nasib berkata lain”.⁷³

Pernyataan juga di dukung oleh Bapak Paringgonan Siregar.

“Saya sangat kecewa dengan cara kerja Aparat Desa Gunung Hasahatan ini, dikarenakan kalalaian dari mereka saya selaku warga yang bekerja sebagai Petugas Kebersihan Kota Padangsidempuan tidak terdaftar dan tidak bisa menikmati bantuan maupun program dari Pemerintah ini”.⁷⁴

Tingkat pendidikan penduduk merupakan salah satu factor yang turut menentukan tingkat pertumbuhan suatu daerah, pada umumnya semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat di suatu daerah maka ada kemungkinan bahwa daerah tersebut akan lebih cepat berkembang atau maju jika dibandingkan dengan daerah lain yang masih rendah tingkat pendidikannya, karena semakin baik cara berfikir, maka daya kreatifitas dan inovasi akan semakin berkembang mampu bersaing.

TABEL III
Tingkat Pendidikan Penerima BLT
Di Desa Gunung Hasahatan 2021

No	Tingkat pendidikan	Jumlah
1	Tidak Tamat SD	2
2	SD	7
3	SLTP	9
4	SLTA	22
	Jumlah	40

Sumber: Dokumen Desa Gunung Hasahatan 2020-2021.

⁷³Asmawati, Warga yang tidak menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Gunung Hasahatan, Wawancara, 25 Oktober 2021, Pukul 15.00 WIB.

⁷⁴Paringgonan Siregar, Warga yang tidak menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Gunung Hasahatan, Wawancara, 25 Oktober 2021, Pukul 20.00 WIB.

Dari tabel di atas dapat dilihat responden yang paling banyak adalah berpendidikan SLTA sebanyak 22 orang, yang tamat SLTP sebanyak 9 orang, yang tamat SD sebanyak 7 orang, dan yang tidak tamat SD sebanyak 2 orang.

Melihat keadaan pekerjaan masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai di Desa Gunung Hasahatan bervariasi, sudah tentu tingkat penghasilan atau pendapatannya pun berbeda sesuai dengan kemampuannya. Untuk lebih jelas mengenai pendapatan atau penghasilan masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai di Desa Gunung Hasahatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL IV
Jumlah Pendapatan Penerima Bantuan Langsung Tunai
di Desa Gunung Hasahatan

No	Pendapatan	Jumlah
1	0	3
2	< 500.000	7
3	500.000 – 1000.000	30
	Jumlah	40

Sumber: Dokumen Desa Gunung Hasahatan 2020-2021.

Dari tabel diatas dapat dilihat pendapatan penerima subsidi Bantuan Langsung Tunai yang paling besar adalah 500.000 – 1.000.000 sebanyak 30 orang, kemudian < 500.000 sebanyak 7 orang, dan kemudian tidak memiliki pendapatan sebanyak 3 orang.

TABEL V
Jumlah Pendapatan Masyarakat Yang Tidak Menerima
Bantuan Langsung Tunai
di Desa Gunung Hasahatan

No	Penghasilan	Jumlah
1	800.000	1
2	800.000 -1.000.000	3

Sumber: Dokumen Desa Gunung Hasahatan 2020-2021.

Adapun jumlah anggota keluarga yang ditanggung oleh seorang penanggung jawab keluarga pada masyarakat penerima subsidi Bantuan Langsung Tunai di Desa Gunung Hasahatan dapat kita lihat pada tabel di bawah ini:

TABEL VI
Jumlah Anggota Keluarga Yang Ditanggung Masyarakat Penerima
BLT Desa Gunung Hasahatan

NO	JUMLAH TANGGUNGAN	JUMLAH
1	Tidak ada tanggungan	3
2	1 Orang	3
3	2 Orang	8
4	3 Orang	13
5	4 Orang	7
6	5 Orang	4
7	6 Orang	1
	Jumlah	40

Sumber: Dokumen Desa Gunung Hasahatan 2020-2021.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah tanggungan anggota keluarga masyarakat penerima subsidi Bantuan Langsung Tunai Per-KK adalah yang 3 orang sebanyak 13 KK, 2 orang sebanyak 8 KK, Tidak punya tanggungan dikarenakan sudah tua ataupun janda ada 3 KK, 1 orang sebanyak 1 KK atau, 4 orang sebanyak 7 KK, 5 orang sebanyak 4 KK atau, dan yang paling sedikit 6 orang sebanyak 1 KK.

TABEL VII
Jumlah Anggota Keluarga Yang Ditanggung Masyarakat Yang Tidak Menerima BLT di Desa Gunung Hasahatan

No	Jumlah Tanggungan	Jumlah
1	2 Orang	2
2	3 Orang	1
3	4 Orang	1

Sumber: Dokumen Desa Gunung Hasahatan 2020-2021.

Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap masyarakat penerima bantuan langsung tunai, diketahui kegunaan / manfaatnya, lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

TABEL VIII
Manfaat/Kegunaan Uang BLT Oleh Masyarakat Desa Gunung Hasahatan

No	Mafaat / Kegunaan	Jumlah
1	Biaya Sekolah	18
2	Modal Usaha	2
3	Kebutuhan Hidup Sehari-hari	20
	Jumlah	40

Sumber: Dokumen Desa Gunung Hasahatan 2020-2021.

Dari tabel di atas diketahui mamfaat yang paling banyak untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yaitu 20 orang, sedangkan untuk biaya sekolah sebanyak 18 orang, dan yang paling sedikit untuk modal usaha hanya 2 orang.

2. Manfaat Yang Dirasakan Oleh Masyarakat Setelah Menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa program bantuan langsung tunai (BLT) di Desa Gunung Hasahatan tidak mengurangi kemiskinan, namun bantuan ini dapat membantu masyarakat miskin agar dapat bertahan hidup,

sehingga masyarakat miskin tidak menjadi lebih miskin. Bantuan ini hanya bisa menambah pendapatan masyarakat dan dapat membantu dalam pemenuhan kebutuhan hidup, namun peranan tersebut relatif kecil karena jumlahnya masih kecil dan bersifat sementara.

Bantuan ini juga tidak sesuai dengan keadaan masyarakat dan dinilai tidak efektif untuk membantu masyarakat kurang mampu atau miskin karena karena bantuan ini bersifat langsung atau uang tunai membuat masyarakat malas untuk bekerja, akan tetapi pemerintah memberikan bantuan berupa lapangan pekerjaan atau peralatan-peralatan yang bisa meningkatkan keahlian dan keterampilan masyarakat untuk melakukan usaha tertentu.

Adapun manfaat yang dirasakan oleh masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT), sebagaimana yang telah diucapkan Ibu Rona dalam wawancara peneliti.

“Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini yang terasa sekali manfaatnya bagi saya selaku pengusaha warung kecil-kecilan dirumah, dengan adanya bantuan ini saya bisa menambah modal usaha saya dan menambah jenis barang yang saya jual di warung saya”.⁷⁵

Pernyataan ini juga didukung oleh Bapak Sawaluddin Harahap selaku penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT).

“Saya selaku karyawan swasta sangat bersyukur sekali dengan adanya program dari pemerintah ini yakni Bantuan Langsung Sosial (BLT), yang dimana manfaatnya sangat berpengaruh sekali bagi saya selaku Kepala Keluarga, karena dengan adanya bantuan dari pemerintah ini saya gunakan dananya untuk biaya sekolah anak-anak saya dan untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya”.⁷⁶

Hal ini juga dinyatakan oleh Bapak Roni Rahmad.

⁷⁵Rona, Warga yang menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Gunung Hasahatan, Wawancara, 24 Oktober 2021, Pukul 13.45 WIB.

⁷⁶Sawaluddin Harahap, Warga yang menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Gunung Hasahatan, Wawancara, 24 Oktober 2021, Pukul 15.00 WIB.

“Bantuan Langsung Tunai (BLT) sangat membantu perekonomian saya sebagai masyarakat penyadap karet yang tidak tentu penghasilannya, uang dari BLT ini saya gunakan untuk membeli perlengkapan dapur dan sebagian lagi untuk biaya sekolah anak-anak saya”.⁷⁷

Hal ini juga di dukung oleh Ibu Berlian Siregar sebagai masyarakat lansia yang tidak memiliki pekerjaan.

“Alhamdulillah dengan adanya BLT ini saya sangat bersyukur sekali, saya sebagai salah satu warga masyarakat di Desa Gunung Hasahatan yang telah lanjut usia yang tidak memiliki pekerjaan. Uang dari Bantuan ini saya gunakan untuk memenuhi kehidupan saya sehari-hari”.⁷⁸

Begitu juga dengan pendapat Ibu Farida menyatakan pendapat.

“Dengan adanya Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Pemerintah ini saya sangat bersyukur sekali, karena yang dulunya saya sering ngutang beras di warung untuk makan saya dan dengan adanya bantuan ini, saya bisa mempergunakan bantuan ini untuk memenuhi kebutuhan ekonomi saya”.⁷⁹

Hal ini juga dinyatakan oleh Ibu Erni Siregar.

“Saya sebagai salah satu warga di Desa Gunung Hasahatan sangat bersyukur sekali dengan adanya program bantuan ini, karena dengan adanya bantuan ini saya bisa mempergunakannya untuk biaya sekolah anak-anak saya. Bantuan ini sangat terasa sekali manfaatnya di keluarga saya”.⁸⁰

Pernyataan ini juga didukung oleh Ibu Masriani Siregar.

“Pada saat sekarang ini ekonomi keluarga saya lagi sulit sekali, dan saya sangat bersyukur sekali dengan adanya dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini. Karena dengan adanya bantuan ini saya sebagai masyarakat yang menikmati bantuan ini sangat terasa sekali

⁷⁷Roni Rahmad, Warga yang menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Gunung Hasahatan, Wawancara, 28 Oktober 2021, Pukul 15.00 WIB

⁷⁸Berlian Siregar, Warga yang menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Gunung Hasahatan, Wawancara, 28 Oktober 2021, Pukul 21.00 WIB

⁷⁹Farida, Warga yang menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Gunung Hasahatan, Wawancara, 29 Oktober 2021, Pukul 09.00 WIB

⁸⁰Erni Siregar, Warga yang menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Gunung Hasahatan, Wawancara, 29 Oktober 2021, Pukul 13.00 WIB

manfaatnya bagi saya dan keluarga saya. Dana Bantuan ini saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan dapur dan biaya sekolah anak-anak saya”.⁸¹

Ibu Rahma Harahap juga menyatakan pendapatnya selaku penerima manfaat BLT.

“Saya sebagai petani sangat merasakan adanya efek yang lumayan berpengaruh terhadap perekonomian saya, dengan adanya bantuan ini saya sebagai petani menggunakan sebagian dari uang bantuan ini untuk membeli perlengkapan bertani saya seperti pupuk dan bibit padi”.⁸²

Dapat disimpulkan dari berbagai hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa masyarakat sangat merasakan manfaat setelah menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT). Pengaruh dari bantuan ini sangat besar sekali manfaatnya dan dapat mempertahankan perekonomian masyarakat di Desa Gunung Hasahatan Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Jurgen Habermas adalah salah seorang tokoh dari Filsafat kritis. Ciri khas dari filsafat kritisnya adalah, bahwa ia selalu berkaitan erat dengan kritik terhadap hubungan-hubungan sosial yang nyata. Pemikiran kritis merefleksikan masyarakat serta dirinya sendiri dalam konteks dialektika struktur-struktur penindasan dan emansipasi. Pemikiran kritis merasa diri bertanggung jawab terhadap keadaan sosial yang nyata.

Apabila dikaitkan dengan teori diatas Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat, jadi disini

⁸¹Masriani Siregar, Warga yang menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Gunung Hasahatan, Wawancara, 02 November 2021, Pukul 11.00 WIB

⁸²Rahma Harahap, Warga yang menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Gunung Hasahatan, Wawancara, 02 Oktober 2021, Pukul 15.00 WIB

peneliti melihat bahwa tidak adanya transparansi antara Aparat Desa dengan masyarakat dan masih ditemukan banyak pro dan kontra terhadap penyaluran bantuan ini. Sehingga masih banyak kesenjangan dan konflik yang ditemukan oleh peneliti dilapangan karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

Kalau kita cermati program ini tampaknya dirasakan ada manfaatnya. Namun masyarakat di desa Gunung Hasahatan kurang memahami arti dari bantuan ini. Hal ini tampak dari pemanfaatan dana yang pada umumnya digunakan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, padahal kalau masyarakat memahami alangkah baiknya digunakan untuk usaha tertentu sehingga menghasilkan pendapatan, dan bantuan ini membuat sebagian masyarakat malas untuk bekerja karena mengandalkan dana tersebut padahal program ini bertujuan untuk membantu dan menambah pendapatan dari masyarakat miskin. Bantuan ini juga bersifat sementara sehingga tidak bisa selamanya membantu perekonomian masyarakat, hanya bisa membantu kebutuhan hidup masyarakat sesaat. Untuk itu diharapkan adanya jenis bantuan yang dapat meningkatkan keahlian dan keterampilan masyarakat sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Ditinjau dari segi kelayakan penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, karena masih banyak masyarakat yang rata-rata ekonominya menengah keatas menerima dan menikmati Bantuan Langsung Tunai (BLT) tersebut. Dilihat dari kondisi ekonomi masih banyak keluarga atau rumah tangga yang pantas dan layak untuk menerima Bantuan Langsung Tunai ini (BLT) ini, mereka tidak menerima hak mereka sebagaimana

yang tertera didalam peraturan penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT). Hal ini dikarenakan kecerobohan pihak pemerintahan desa yang kurang teliti dalam mendata masyarakat yang kurang mampu atau yang ekonominya menengah ke bawah.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Gunung Hasahatan Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, maka di peroleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Gunung Hasahatan dilakukan dengan 3 (tiga) tahapan yaitu memuat manajemen, administrasi, dan pendistribusian. Proses penyaluran ini juga tidak sesuai dengan ketentuannya, karena masih banyak Pro dan Kontra tentang bantuan ini yang terjadi di kalangan masyarakat, karena masih ada sebagian warga yang tidak menerima Bantuan Langsung Tunai ini, dan masyarakat yang menerima belum paham dengan maksud dan tujuan dari bantuan ini. sehingga banyak masyarakat bermalas-malasan untuk bekerja karena mereka telah bergantung kepada bantuan tersebut. Dilihat dari penyalurannya masih banyak kaum menengah keatas yang menikmati dana bantuan ini, sedangkan masih ada masyarakat yang layak untuk menerima bantuan ini.
2. Program dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Gunung Hasahatan tidak mengurangi kemiskinan, namun dapat disimpulkan dari berbagai hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa masyarakat sangat merasakan manfaat setelah menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT). Pengaruh dari bantuan ini sangat besar sekali manfaatnya dan dapat mempertahankan perekonomian masyarakat di Desa Gunung Hasahatan Kecamatan

Padangsidimpuan Batunadua. Bantuan ini hanya dapat membantu masyarakat miskin agar dapat bertahan hidup. Peranan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk mengurangi kemiskinan relatif kecil karena jumlah yang diberikan sedikit dan bersifat sementara.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis mencoba untuk mengajukan saran atau masukan dengan harapan nantinya dapat membantu pihak-pihak yang terkait dalam menunjang pelaksanaan program Bantuan langsung Tunai (BLT) khususnya di Desa Gunung Hasahatan. Adapun saran-saran tersebut antara lain :

1. Untuk memastikan data jika terjadi penambahan penerima BLT hendaknya di daftarkan dan membuat data baru kembali, sehingga masyarakat yang tergolong miskin bisa menikmati dan merasakan manfaat dari Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini..
2. Program bantuan untuk masyarakat miskin seharusnya lebih difokuskan untuk menumbuhkan budaya ekonomi produktif dan mampu membebaskan ketergantungan penduduk yaitu dengan memberikan peralatan-peralatan untuk melakukan usaha tertentu.
3. Kepada masyarakat hendaknya dapat lebih memanfaatkan proram BLT ini dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam hal peningkatan pendapatan khususnya masyarakat di Desa Gunung Hasahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Cetakan 4 Jakarta : Kencana, 2017.
- Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Perkotaan Memahami Masyarakat Kota dan Problematikanya*, Bandung : Pustaka Setia, 2017.
- Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cerakan 1 Jawa Barat : CV Jejak, 2018.
- Anwar Ibrahim, *Skripsi Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid 19 di Desa Sermong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat*.
- BKKBN, *Pelaksanaan Operasional Indikator Pembangunan Keluarga Sejahtera*, Jakarta: BKKBN, 1994.
- Djazuli, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*, Bandung: Kencana, 2003.
- Hadi Prayitno dan Budi Santoso, *Ekonomi Pembangunan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996.
- Hadi Prayitno, *Ekonomi Pembangunan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996.
- Hasbi Indra dan Iskandar Ahza, *Potret Wanita Shalehah*, Jakarta: Penamadani, 2004.
- Helaluddin, Hengki Wijaya, *Analisa Data Kualitatif*, Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019.
- Hertina dan Jumni Neli, *Sosiologi Keluarga*, Riau: Alaf Riau, 2007.
- Husean Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Inpres No. 12 tahun 2005 tentang pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada rumah tangga miskin.
- Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2008 tanggal 14 Mei 2008. *Tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Untuk Rumah Tangga Sasaran*.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.

- Kementrian Sosial RI, *Pedoman Umum Bantuan Sosial Beras Sejahtera Tahun* 2018, Jakarta: 2017.
- Keputusan Menteri Sosial RI, No. 23/Huk/1996. *Tentang Pola Dasar Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: DEPSOS RI, 1996.
- Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2005 tanggal 10 September 2005. *Tentang Bantuan Langsung Tunai Kepada Rumah Tangga Miskin*.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, Bandung : Remaja Rosda, 1996.
- Lukman Hakim, Ahmad Danu Syaputra, “*Al-Qur’an dan Pengentasan Kemiskinan*,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta : Bumi Aksara, 1989.
- Masri Singarimbu dan Sopian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta : LP3ES, 1989.
- Moh. Natsir, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghaliya Indonesia, 1998.
- Mulyanto Sumardi, dan Hans Dieter Ever, *Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok*, Jakarta : CV Rajawali, 1982.
- Nana Sudjana, *Penelitian & Penilaian Pendidikan*, Bandung : Sinar Baru, 1989.
- Nugroho Kusuma, *Skripsi Analisis Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kartasura*.
- Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 94/PMK.07/2021.
- Philip dan Nurul Aini, *Sosiologi dan Politik*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Selamat Triono Ahmad, *Metodologi Penelitian*, Medan : Indah Grafika, 2007.
- Selviana, “*Bantuan Langsung Tunai*,” *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi* Volume III No. 2 November 2016 ISSN e-2477-0221 p-2339-2401.
- Sonia Dwi Prastiti, *Skripsi Analisa Masalah Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masyarakat Miskin di Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur*.

- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Cet. Ke 17*, Bandung : Al-fabeta, 2012.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta : Rineca Cipta, 2016.
- Sukirno Sadono, *Pengantar Teori Makro Ekonomi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Suprajitno, *Asuhan Keperawatan Keluarga*, Jakarta: EGC,2004.
- Teguh Putra, Arka'a Ahmad Agin Medinal, "Analisis Pengaruh Pendidikan, Pengangguran, dan Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kemiskinan di Kelurahan Tuatunu Indah Kota Pangkal Pinang," *Jurnal Progresif Manajemen Bisnis (JIPMB)*, STIE-IBEK, Volume 6 Nomor 5 November 2019. ISSN 2354- 5682.
- Tulus T. H Tambunan, *Perekonomian Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003.
- Undang-undang No. 25 Tentang Program Pembangunan Nasional 2000-2004 Pasal 4 Ayat 1.
- W. H. S Poerwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1999.
- Wawancara dengan Kepala Desa Gunung Hasahatan, 10 April 2021.
- Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Terj. Halim, Jakarta : Gema Insani Press, 2015.
- Wahidin Saputra, *Pengantar Ilmu Dakwah*, Jakarta : Rajawali Pers, 2012.
- Muhammad Sulthon, *Desain Ilmu Dakwah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Muhammad Fardan Ngoyo, *Mengawal Sustainable Development Goals (SDGs) Meluruskan Orientasi Pembangunan yang Berkeadilan*, *Jurnal Sosioreligius* Volume I No. 1 Juni 2015.
- Frans Magnis-Suseno, *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*, Yogyakarta: Kansius, 1992.
- Wardi Bachtiar, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah. Cet. Ke 1*(Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997.

Dokumentasi



Keterangan: Photo bersama Aparatur Pemerintahan Desa Gunung Hasahatan.



Keterangan: Pembagian dana Bantuan Langsung Tunai (BLT).



Keterangan: Wawancara dengan kepala Lingkungan Desa Gunung Hasahatan.



Keterangan: Wawancara dengan Sekdes Desa Gunung Hasahatan.



Keterangan: Wawancara dengan Bendahara Desa Gunung Hasahatan.



Keterangan: Wawancara dengan Kaur Desa Gunung Hasahatan.



Keterangan: Wawancara dengan LINMAS Desa Gunung Hasahatan.



Keterangan: Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT).



Keterangan: Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT).



Keterangan: Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT).



Keterangan: Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT).



Keterangan: Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT).



Keterangan: Wawancara dengan Warga yang tidak menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Gunung Hasahatan.

140 In. 14/F.4c/PP.00.9/12/2020

Padangsidimpuan, 7 Desember 2020

Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

Kepada :
Yth : 1. Drs. Kamaluddin, M.Ag
2. Masrul Efendi Umar Harahap, M.Sos

Di tempat

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan Hasil Sidang Keputusan Tim Pengkajian Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa/i tersebut di bawah ini sebagai berikut:

Nama/Nim : MARA PANUSUNAN/ 17 303 00011
Fakultas/Prodi : Dakwah dan Ilmu Komunikasi/ PMI
Judul Skripsi : "PROSES PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) KEPADA MASYARAKAT PRASEJAHTERA DI DESA GUNUNG HASAHATAN KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA"

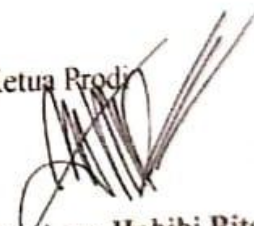
Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu Menjadi Pembimbing-I dan Pembimbing-II penelitian penulisan Skripsi Mahasiswa/i dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/ Ibu kami ucapkan terima kasih.

Dekan



Dr. Ali Sati, M.Ag
NIP. 196209261993031001

Ketua Prodi

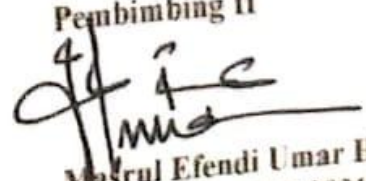

Dr. Anas Habibi Ritonga, M.A
NIP. 198404032015031004

Pernyataan Kesediaan Sebagai Pembimbing

Bersedia/Tidak bersedia
Pembimbing I


Drs. Kamaluddin, M.Ag
NIP. 196511021991031001

Bersedia/Tidak Bersedia
Pembimbing II


Masrul Efendi Umar Harahap, M.Sos
NIP. 199103202019031008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Jalan. T. Rizal Nurdin Km 4,5Sihitang Padangsidimpuan 22733
 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

nomor : 1618 /In.14/F.4c/PP.00.9/11/2021
 : Penting
 : -
 : **Mohon Bantuan Informasi**
 : **Penyelesaian Skripsi**

30 November 2021

h. Kepala Desa Gunung Hasahatan Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua
 Tempat

Dengan hormat, Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa :

Nama : Mara Panusunan
 M : 17 303 00011
 Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Ilmu Komunikasi/ PMI
 Alamat : Gunung Hasahatan n Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua

adalah benar Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul "**PROSES PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) KEPADA MASYARAKAT RASEJAHTERA DI DESA GUNUNG HASAHATAN KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA**"

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Kepala Desa untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul tersebut.

Demikian disampaikan, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.



Dekan

Dr. Ali Sati, M.Ag

NIP. 196209261993031001



PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA
DESA GUNUNG HASAHATAN

KodePos : 22733

Perihal : Surat Keterangan Balasan Riset
Nomor : 009/349/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Usman Siregar

Jabatan : Kepala Desa Gunung Hasahatan Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua

Menerangkan sebenarnya bahwa:

Nama : Mara Panusunan

NIM : 1730300011

Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam

Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan

Berdasarkan surat No. 009/349/2022 Perihal izin Riset. Benar telah diberikan Izin Riset untuk penelitian oleh Kepala Desa Gunung Hasahatan Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua dari bulan November 2021 sampai dengan selesai, dengan judul **"PROSES PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) KEPADA MASYARAKAT PRASEJAHTERA DI DESA GUNUNG HASAHATAN KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA"**.

Demikianlah surat keterangan ini diperbuat supaya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padangsidimpuan, 02 Maret 2022

di Kepala Desa Gunung Hasahatan

